

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
DALAM ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS MASYARAKAT
MUSLIM DESA SETIA KECAMATAN PAHAE JAE
KABUPATEN TAPANULI UTARA)**

TESIS

OLEH

SHOLIHIN GULTOM
NIM : 922 1202 2715



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholihin Gultom

Nim : 92212022715

Tempat /tgl. Lahir : Sirihit-rihit 13 Januari 1986

Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN-SU Medan

Alamat : Jalan Letda Soejono No.21. Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS MASYARAKAT MUSLIM DESA SETIA KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI UTARA)” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 3 Mei 2014
Yang membuat pernyataan,

Sholihin Gultom, M.H.I

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
DALAM ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS MASYARAKAT
MUSLIM DESA SETIA KECAMATAN PAHAE JAE
KABUPATEN TAPANULI UTARA)**

Oleh :

SHOLIHIN GULTOM
NIM : 922 1202 2715

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
Memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara

Medan April 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA.
NIP. 195511101981031010

Dr. Nurasiah, MA.
NIP. 196811231994032002

PENGESAHAN

Tesis ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”** an. Sholihin Gultom, NIM. 92212022715 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 14 Mei 2014.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 14 Mei 2014
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Prof. Dr. Pagar, M.Ag.)
NIP. 196207161990031004

(Dr. Sulidar, M.Ag.)
NIP. 196705261996031002

Anggota

1. (Prof. Dr. Pagar, M.Ag.)
NIP. 196207161990031004

2. (Dr. Sulidar, M.Ag.)
NIP. 196705261996031002

3. (Dr.H. Hasan Mansur Nasution, MA.)
NIP. 1955 1110 1981 031010

4. (Dr. Nurasiah, MA.)
NIP. 1968 1123 1994032002

Mengetahui,
Direktur PPs. IAIN-SU

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.)
NIP. 1958 0815 1985 0310 07

ABSTRAKSI



Tesis ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”.

Nama : Sholihin Gultom
Nim : 92212022715
Pembimbing I : Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA.
Pembimbing II : Dr. Nurasiah, MA.

Tesis ini melakukan observasi terhadap pelaku larangan pernikahan adat Batak Toba dan observasi terhadap beberapa informan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana aturan hukum perkawinan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. (2). Apa faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan perkawinan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. (3). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan hukum perkawinan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *Non doktrinal research*. Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor-faktor tertentu. Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.

Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam aturan perkawinan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia ada “larangan pernikahan adat”. Walau syarat dan rukun telah terpenuhi menurut hukum Islam, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Adapun faktor-faktor larangan pernikahan adat bagi masyarakat muslim Batak Toba adalah sebab; ikrar janji, bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama, dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama, seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari bibinya atau sebaliknya, (*pariban*) yang tidak boleh dinikahi, (semua mahram sebab nasab menurut hukum Islam), istri dari (*lae/ipar*) yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, istri paman, putri dari teman satu (marga), saudara hasil adopsi orang tua, menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan), istri teman, perempuan yang mencari perlindungan karena tidak akur dengan suaminya. Dan latar belakang sosiologisnya karena karena masyarakat Desa Setia masih tetap mempercayai dan mentaati dengan setia aturan hukum adat Batak Toba yang sudah berjalan turun temurun dari orang-orang terdahulu.

Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba banyak yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun ada beberapa hal yang bertentangan, yaitu dilarang menikah dengan: Putri dari saudara laki-laki ayah (kandung), istri dari (*lae/ipar*) yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari teman (satu marga), saudara hasil adopsi orang tua, menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan), istri teman, perempuan yang mencari perlindungan karena tidak akur dengan suaminya.

Abstract

This thesis entitled "The views of Islamic Law Marriage Against Prohibition In Indigenous Toba Batak (Case study of Muslim societies Village Setia Subdistrict Pahae Jae District North Tapanuli)". This thesis observe the customary marriage ban offenders Batak Toba and the observation of several informants. Principal issue in this study is (1). How customary law marriage in Muslim society Batak Toba, village Setia Subdistrict Pahae Jae Regency Tapanuli North. (2). What are the factors and sociological background of customary marriage ban for the Muslim community Batak Toba Village Setia Subdistrict Pahae Jae Regency Tapanuli North. (3). What does the Islamic law on customary marriage law in Muslim society Toba Batak Village Setia Subdistrict Pahae Jae Regency Tapanuli North.

This research is empirical legal research, known as non-doctrinal research. Therefore this study is to describe systematically descriptive, factual and accurate to cases in which the issues examined included the properties, characteristics and certain factors. So the method to collect the data is qualitative research method is an approach that is not done by using formulas and statistical symbols.

In the final conclusion is that the rules of customary marriages for Muslims Batak Toba Village Faithful, there is "customary marriage ban". Although the terms and pillars have been met according to Islamic law, but the Muslim community Batak Toba Village Setia not necessarily allow the conduct of the marriage.

The factors of customary marriage ban for the Muslim community Batak Toba is the cause; pledge promise, brothers of men and women in particular expressed by the same clan, two brothers-in-law has the same bladder, a man marry the daughter of his aunt or otherwise, (*pariban*) that should not be married, (all mahram because nasab according to Islamic law), wife of (*lae* / in-laws) that have been a widow, the daughter of the father's sister, uncle's wife, the daughter of a friend (clan), brother of the results of the adoption of older people, married women (widows) who have not completed past pregnancy (9 months), wife of a friend, women seeking protection because they do not get along with her husband. And sociological background, because the faithful villagers still believe and faithfully obey the rules of customary law existing Toba Batak handed down from the past.

View of Islamic law on customary marriage ban on the Muslim community Batak Toba lot in accordance with the rules of Islamic law. However there are a few things to the contrary, that is forbidden to marry by: Daughter of brother man father (biological), the wife of (*lae* / in-laws) that have been a widow, the daughter of the father's sister, the daughter of a friend (one genus), brother of results adoption parents, married women (widows) who have not completed their pregnancy (9 months), wife of a friend, women seeking protection because they do not get along with her husband.

ملخص

هذه أطروحة بعنوان "وجهات نظر الشريعة الإسلامية الزواج ضد حظر في الأصليين باتاك توبا دراسة حالة المجتمعات مسلم قرية ستيا منطقة ثانوية فهائي جاعي منطقة تفنولي الشمالية". هذه الأطروحة مراقبة المجرمين العرفي حظر الزواج باتاك توبا ومراقبة العديد من المخبرين. المسألة الرئيسية في هذه الدراسة هو (1). كيف العرفي زواج القانون في المجتمع مسلم باتاك توبا، قرية ستيا منطقة ثانوية (فهائي جاعي) ريجنسي تفنولي الشمالية. (2). ما هي العوامل والخلفية الاجتماعية من حظر الزواج العرفي للمجتمع مسلم باتاك توبا قرية ستيا منطقة ثانوية فهائي جاعي ريجنسي تفنولي الشمالية (3). ما يقوم به الشريعة الإسلامية على قانون الزواج العرفي في المجتمع مسلم باتاك توبا قرية ستيا منطقة ثانوية (فهائي جاعي) ريجنسي تفنولي الشمالية.

هذا البحث هو البحث القانوني التجريبية، والمعروفة باسم البحوث غير مذهبي. وبالتالي هذه الدراسة هو وصف وصفي منهجية وواقعية ودقيقة على الحالات التي شملت القضايا فحص خصائص وخصائص وعوامل معينة. حتى طريقة لجمع البيانات هي طريقة البحث النوعي هو النهج الذي لم يتم ذلك باستخدام الصيغ والرموز الإحصائية. في استنتاج نهائي هو أن قواعد الزواج العرفي للمسلمين باتاك توبا قرية ستيا سريهت- ريهت، وهناك "حظر الزواج العرفي". على الرغم من أن الشروط والأركان قد تم الوفاء بها وفقا للشريعة الإسلامية، ولكن المجتمع مسلم باتاك توبا قرية ستيا سريهت- ريهت، لا تسمح بالضرورة سلوك الزواج.

العوامل من حظر الزواج العرفي للمجتمع مسلم باتاك توبا هو السبب؛ تعهد الوعد، أيها الإخوة من الرجال والنساء على وجه الخصوص التي أعرب عنها نفس العشيرة، واثنين من الإخوة في القانون لديه نفس المثانة، وهو رجل الزواج من ابنة خالته أو غير ذلك، (فريبن *pariban*) التي لا ينبغي أن تكون متزوجة، (كل محرم لنسب وفقا للشريعة الإسلامية)، زوجة لاي / في القوانين التي كانت أرملة، ابنة شقيقة والده، وزوجة عمه، وابنة صديق (عشيرة)، شقيق نتانج اعتماد كبار السن، النساء المتزوجات الأرامل الذين لم يكملوا الماضية الحمل (9 أشهر)، زوجة أحد الأصدقاء، والنساء الذين يلتمسون الحماية لأنها لا تحصل على طول مع زوجها. والخلفية الاجتماعية، وذلك لأن المؤمنين القرويين ما زالوا يؤمنون بإخلاص والاتصايع لقواعد القانون العرفي القائم توبا باتاك المتوارثة من الماضي.

نظر القانون الإسلامي على حظر الزواج العرفي على المجتمع مسلم باتاك توبا الكثير وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية. ولكن هناك عدد قليل من الأشياء على العكس من ذلك، وهذا هو ممنوع على الزواج من قبل: ابنة الأب شقيق الرجل (البيولوجية)، زوجة لاي / في القوانين التي كانت أرملة، ابنة شقيقة والده، وابنة صديق (جنس واحد من المرغا)، شقيق نتانج الآباء بالتبني، النساء المتزوجات الأرامل الذين لم يكملوا فترة الحمل (9 أشهر)، زوجة أحد الأصدقاء، والنساء الذين يلتمسون الحماية لأنها لا تحصل على طول مع زوجها.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar *Magister Hukum Islam* (M.H.I.).

Dalam tesis ini, penulis banyak menemukan kesulitan, namun berkat taufiq dan ‘inayah dari Allah serta bantuan dari partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun disana sini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Ayahanda alm. Ramli Gultom dan ibunda saya Tiaminah Pane, yang telah bersusah payah menyekolahkan dan membiayai sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Do’a tulus yang dapat penulis berikan kepada mereka berdua, semoga Allah membalas amal baik mereka. Juga kepada abang, kakak dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah swt. dapat pula menjadikan mereka menjadi orang yang sukses di kemudian hari dan senantiasa di jalan-Nya.
2. Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA., sebagai Direktur PPS. IAIN Sumatera Utara Medan.

3. Prof. Dr. H. Ahmad Qarib, MA., sebagai Ketua Prodi Hukum Islam PPS. IAIN Sumatera Utara Medan.
4. Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA., sebagai pembimbing I penulis dalam bidang isi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Dr. Nurasih, MA., sebagai pembimbing II penulis dalam bidang metodologi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Para guru-guru besar PPS IAIN Sumatera Utara Medan selaku guru pembimbing dalam mendalami kajian hukum Islam, yang telah banyak berjasa mendidik penulis, dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam upaya peningkatan intelektual penulis dalam dunia akademisi dan kajian fikih.
7. Para staf, karyawan administrasi perpustakaan PPS IAIN Sumatera Utara Medan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita bersama.

Medan, Mei 2014
Penulis,

Sholihin Gultom

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Araf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	B	be
ت	<i>ta</i>	T	te
ث	<i>sa</i>	ś	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	J	je
ح	<i>ha</i>	Ẓ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	R	er
ز	<i>zai</i>	Z	zet
س	<i>sin</i>	S	es
ش	<i>syim</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>sad</i>	i	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	«	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ta</i>	—	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>za</i>	§	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	`	koma terbalik di atas
غ	<i>gain</i>	G	ge
ف	<i>fa</i>	F	ef
ق	<i>qaf</i>	Q	qi
ك	<i>kaf</i>	K	ka
ل	<i>lam</i>	L	el
م	<i>mim</i>	M	em
ن	<i>nun</i>	N	en
و	<i>waw</i>	W	we
ه	<i>ha</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	’	apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fatḤah</i>	a	a
—	<i>Kasrah</i>	i	i
—	« <i>amah</i> »	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي —	<i>FatḤah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
و —	<i>FatḤah</i> dan <i>waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

ذكر : *ḡukira*

يذهب : *yazhabu*

سئل : *suila*

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>FatḤah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يَ —	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و —	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال
ramā : رما
qīla : قيل
yaqūlu : يقول

d. Ta marbū^{ah}

Transliterasi untuk ta marbū^{ah} ada dua:

1) ta marbū^{ah} hidup

Ta marbū^{ah} yang hidup atau mendapat *Ḥarkat fatḤah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbū^{ah} mati

Ta marbū^{ah} yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbū^{ah} diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbū^{ah} itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rau«ah al-a^{fāl} – rau«atul a^{xii}* : روضة الأطفال
- *al-Madīnah al Munawwarah* : المدينة المنورة

- *al-Yah* : طحة

e. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-Yajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf ^{xiii} *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu* : الرجل
- *as-sayyidatu* : السيدة
- *asy-syamsu* : الشمس
- *al-qalamu* : القلم
- *al-badī'u* : البديع
- *al-jalālu* : الجلال

g. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

contoh:

- *ta'khuzūna* : تاخذون
- *an-nau'* : النوء
- *syai'un* : شئىء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

xix

h. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *Ẕarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallāha lahua khair ar-rāzīqin*: وان الله لهم خير الرازقين
- *Wa innallāha lahua khairurrāziqin*: وان الله لهم خير الرازقين
- *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna*: فاوفوا الكيلو الميزان:
- *Fa auful-kaila wal-mīzāna*: فاوفوا الكيلو الميزان:
- *Ibrāhīm al-Khalīl*: ابراهيم الخليل:
- *Ibrāhimul-Khalīl*: ابراهيم الخليل :
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*: بسم الله مجراها و مرسها:
- *Walillāhi ‘alan-nāsi Yijju al-baiti*: والله على الناس حج البيت :
- *Man istā‘a ilaihi sabīlā*: من استطاع اليه سبيل:
- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*: والله على الناس حج البيت :
- *Man istā‘a ilaihi sabīlā*: من استطاع اليه سبيل :

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan ^{xv} huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḩammadun illārasūl*

- *Inna awwala baitin wu«i'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan*
- *Syahru Rama«ān al-lazīunzila fīhi al-Qur'an*
- *Syahru Rama«ānal-lazī unzila fīhil-Qur'an*
- *Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil –'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- *Naḥrun minal āhi wa fatḤun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-armu jamī'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang mengingin^{xvi} fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.

k. Singkatan

Penulisan ini memakai singkatan kata. Karena itu transliterasi ini disertai dengan singkatan.

Contoh:

- *SWT = subḤānāhu wata'ālā*
- *h = halaman*

-SAW= *iallāhu 'alaihi wasallam*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Landasan Teori.....	13
G. Kajian Terdahulu.....	26
H. Metodologi Penelitian	27
I. Sistematika Penulisan	31

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wanita-Wanita Yang Haram Dinikah	33
B. Pengertian <i>Al-Muharramat</i>	34
C. Wanita-Wanita Yang Termasuk <i>Al-Muharramat</i>	34
A. 1. Versi Fiqih klasik	34
A. 2. Versi Kompilasi Hukum Islam.....	47
D. Pandangan hukum Islam Terhadap adat	49
E. Integrasi Hukum Islam ke Hukum adat Batak Toba.....	54

BAB III LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Setia.....	58
------------------------------------	----

B. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Letak Desa Setia	58
C. Pemukiman.....	60
D. Letak Demografis	61
E. Tingkat Pendidikan	63
F. Agama	64
G. Mata Pencarian Pola Masyarakat	67
H. Tahapan Adat Pernikahan Batak Toba.....	67
I. Acara Pesta Pernikahan Adat Batak Toba	69

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Aturan Pernikahan Adat bagi Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia.....	80
B. Faktor-faktor dan latar belakang sosiologis yang menyebabkan adanya larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba	81
C. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia.....	98
D. Analisis.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Batas wilayah Desa Setia	59
2. Luas wilayah Desa Setia	59
3. Jarak kantor Desa Setia ke kantor camat.....	60
4. Jumlah penduduk dan luas desa Per Km dirinci menurut dusun	62
5. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut dusun	62
6. Jumlah Sekolah Dasar	64
7. Jumlah SLTP dan SLTA dirinci menurut status sekolah	64
8. Jumlah rumah ibadah di Desa Setia	66
9. Banyaknya penduduk menurut mata pencaharian di Desa Setia	67

BAB I

PENDAHULUAN

J. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrumen pengendalian sosial. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan demikian hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat manusia.¹ Betapapun primitifnya suatu masyarakat senantiasa berada dalam kehidupan yang dikendalikan oleh sistem hukum tertentu.²

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.

Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, banyak sekali hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pernikahan. Itu semua diakibatkan oleh kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Jika kita menghitung berapa banyak jumlah suku di Indonesia yang mana setiap suku pastinya memiliki hukum masing-masing. Dan pluralisme hukum perkawinan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h.67. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.174.

² Adam Podgorezki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 252. Lihat Juga Yasir Nasution, “*Hukum Islam dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*,” dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. III, h. 1.

tentang perkawinan, hukum yang mengatur perkawinan dalam masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:³

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agamanya (hukum perkawinan Islam).
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum perkawinan adat masing-masing.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya yang beragama kristen, berlaku hukum (ordonansi) perkawinan kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*) Stb. 1933 No. 74.
4. Bagi orang-orang Timur Asing, Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, suatu pernikahan dipandang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau adat yang berlaku. Lalu setelah tahun 1974 secara otomatis dalam unifikasi, hukum yang berlaku untuk bidang perkawinan Indonesia adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Setelah Undang-undang pernikahan tersebut

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Rineka Cipta, 2003), h. 182.

diberlakukan, dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Dan bagi umat yang beragama Islam hukum pernikahan yang berlaku adalah Hukum Islam.

Masalah pernikahan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama. Kalau dikaitkan dengan hukum yang formal dan hukum yang tidak formal, permasalahan pernikahan sangat banyak, diantaranya; yang pertama masalah pernikahan beda agama, yang kedua pernikahan di bawah tangan/sirri, dan yang ketiga pernikahan yang dilarang oleh hukum adat.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam hukum pernikahan yang ada di Indonesia ini adalah pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam aturan adat pada masyarakat ini, ada “larangan pernikahan adat”. Bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan, lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walaupun hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia ini, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut. Seluruh rangkaian hukum pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, adalah hal yang harus untuk dilaksanakan. Yaitu, dengan menjalankan aturan larangan pernikahan antar

orang-orang tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat suku Batak Toba, dari dahulu hingga sekarang.⁴

Dalam pernikahan adat Batak Toba masyarakat Desa Setia, ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati. Dan apabila aturan tersebut dilanggar/diabaikan, maka akan memunculkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang muncul diatur sangat jelas dan tegas. Dan ini telah dianut oleh masyarakat Batak Toba Desa Setia sejak dahulu sampai sekarang. Aturan hukum yang dilanggar oleh anggota masyarakatnya, maka penatua desa akan bertindak sebagai eksekutor hukuman. Adakalanya dengan bentuk hukuman dibuang atau diusir dari kampung, dicoret dari tatanan silsilah keluarga dan pernikahannya dinyatakan batal.⁵

Contoh dari larangan pernikahan adat bagi masyarakat muslim Batak Toba Desa Setia ini adalah sebagai berikut:⁶

1. *Namarito*

Namaito (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Kumpulan PARNA (*Pomparan ni Raja Naiambaton*/anak dan keturunan raja *Naiambaton*), sebanyak 66 marga yang terdapat dalam persatuan PARNA yang dilarang untuk saling menikah. Namun menurut sebagian pendapat, ada 67 marga yang tergolong dalam persatuan PARNA yang dilarang untuk saling menikah. Adapun marga-

⁴ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutasuht, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan "*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*" (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 99-109. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197-209.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

marga batak yang termasuk dalam *Pomparan ni Raja Naiambaton*/keturunan dari raja *Naiambaton* sebagai berikut:⁷

1. Bancin (Sigalingging). 2. Banurea (Sigalingging), 3. Boangmenalu (Sigalingging), 4. Brampu (Sigalingging), 5. (Brasa Sigalingging), 6. Bringin (Sigalingging), 7. Dalimunthe, 8. Gajah (Sigalingging), 9. Garingging (sigalingging), 10. Ginting Baho, 11. Ginting Beras, 12. Ginting Capa, 13. Ginting Guru Putih, 14. Ginting Jadi Bata, 15. Ginting Jawak, 16. Ginting Manik, 17. Ginting Munthe, 18. Ginting Pase, 19. Ginting Sinisuka, 20. Ginting Sugihen, 21. Ginting Tumagger, 22. Haro, 23. Kombih (Sigalingging), 26. Munte, 27. Nadeak, 28. Nahampun, 29. Napitu, 30. Pasi, 31. Pinayungan (Sigalingging), 32. Rumahorbo, 33. Saing, 34. Saraan (Sigalingging), 35. (Saragih Dajawak, 36. Saragih Damunte, 37. Saragih Dalasak, Saragih Sumbayak, 39. Saragih Siadari, 40. Siallagan, 41. Siambaton, 42. Sidabalok, 43. Sidabungke, 44. Sidabutar, 45. Saragih Sidauruk, 46. Saragih Garingging, 47. Saragih Sijabat, 48. Simalango, 49. Simanihuruk, 50. Simarmata, 51. Simbolon Altong, 52. Simbolon Hapotan, 53. Simbolon Pande, 54. Simbolon Panihai, 55. Simbolon Suhut Nihuta, 56. Simbolon Tuan, 57. Sitanggang Bau, 58. Sitanggang Gusar, 59. Sitanggang Lipan, 60. Sitanggang Silo, 61. Sitanggang Upar Parrangin Na 8 (Sigalingging), 62. Sitio, 63. Tamba, 64. Tinambunan, 65. Tumanggor, 66. (Turnip), 67. Turuten.

2. Namarpandan

Namarpadan/ padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang *padan* marga. Misalnya marga-marga berikut ini:

⁷ *Ibid.*.

1. Hutabarat dan Silaban Sitio.
2. Manullang dan Panjaitan.
3. Sinambela dan Panjaitan.
4. Sibuea dan Panjaitan.
5. Sitorus dan Hutajulu (termasuk Hutahae dan Aruan).
6. Sitorus Pane dan Nababan.
7. Naibaho dan Lumbantoruan.
8. Silalahi dan Tampubolon.
9. Sihotang dan Toga Marbun (termasuk Lumbanbatu, Lumbangaol, Banjarnahor).
10. Manalu dan Banjarnahor.
11. Simanungkalit dan Banjarnahor.
12. Simamora Debataraja dan Manurung.
13. Simamora Debataraja dan Lumbangaol.
14. Nainggolan dan Siregar.
15. Tampubolon dan Sitompul.
16. Pangaribuan dan Hutapea.
17. Purba dan Lumbanbatu.
18. Pasaribu dan Damanik.
19. Sinaga Bonor Suhutnihuta dan Situmorang Suhutnihuta.
20. Sinaga Bonor Suhutnihuta dan Pandeangan Suhutnihuta.

3. Dua Punggu Sada Ihotan

Dua Punggu Sada Ihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan antara dua orang yang bersaudara (abang-adik laki-

laki) bermarga A dengan dua orang yang bersaudara (kakak-adik perempuan) bermarga B. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

4. *Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang*

Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang: Larangan berikutnya adalah seorang laki-laki dilarang menikahi *boru* (anak perempuan) dari *namboru* kandung / saudara perempuan dari ayah kandung).

5. *Pariban Na So Boi Olion / Boru Tulang Nasoboi Olion*

Ternyata ada pariban yang tidak bisa saling menikah, siapa dia sebenarnya? Bagi orang batak *ruhut* /aturan adat batak ada dua jenis untuk kategori *Pariban Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *pariban* kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu *pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 7 orang perempuan *pariban* kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi *pariban-paribannya* (Kategori yang pertama ini, dapat disamakan dalam pembahasan *Dua Punggu Sada Ihotan*). Yang kedua adalah *pariban* kandung/ atau tidak, yang berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, maka perempuan yang bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, maka tidak diperbolehkan untuk menikah.

Selain aturan di atas masih ada aturan yang mengatur tentang pernikahan yang dilarang menurut hukum adat Batak Toba yaitu:⁸

⁸ *Ibid.*,

1. *Inang Pangintubu Ni Iba/Ibu Kandung.*
2. *Inang Panoroni/Ibu tiri.*
3. *Inang ni Amaniba (Ompung boru)/Nenek.*
4. *Inang panoroni ni Amangniba/Nenek tiri.*
5. *Boru ni Amaniba (iboto niba sandiri)/Saudara Kandung.*
6. *Iboto ni Amaniba (Namboruniba)/Saudara Perempuan Ayah.*
7. *Boru ni Iboto niba(bere)/Putri dari saudara perempuan.*
8. *Parumaenniba/Menantu..*
9. *Boru ni Amangtua manang Amanguda niba/Putri dari saudara laki-laki ayah.*
10. *Nioli ni Tunggane niba naung mabalu (Inangbaoniba)/Istri dari Tunggane.*
(tunggane adalah kebalikan dari *Lae*).
11. *Boru ni Namboruniba/Putri dari Saudara Perempuan Ayah.*
12. *Nantulang manang Nantulang panoroni/Istri Tulang.*
13. *Boru ni Dongan Samarga dohot Iba/ anak perempuan dari teman semarga*
(Satu Marga).
14. *Boru naniain (adopsi)/Saudara hasil Adopsi orang tua.*
15. *Napareakkon Boru-boru namabalu anggo so salpu dope tingki haroanna atik*
naung marisi bortianna. /Menikah dengan perempuan (janda) yang belum
selesai masa kehamilannya (9 bulan).
16. *Boru-Boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)/Istri Teman).*
17. *Boru-boru namandiori parlindungan ala marbadai dohot sinondukna./*
Perempuan yang mencari perlindungan karena cecok dengan suaminya.

Sekalipun syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi menurut aturan hukum Islam, namun marga-marga dan orang-orang yang sudah ditentukan

tersebut di atas tetap tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan apabila aturan “larangan pernikahan adat” tersebut dilanggar, maka para tokoh adat akan memberikan sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut.

Aturan hukum adat yang ada dalam masyarakat Desa Setia sirihih rihit tersebut, sangat berseberangan dengan aturan hukum *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 4 dan aturan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1). Kesenjangan yang ada ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setia, belum mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS MASYARAKAT MUSLIM DESA SETIA KEC.PAHAE JAE KAB.TAPANULI UTARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Apa faktor-faktor dan latar belakang sosiologis dari larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai maksud istilah yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan terdiri dari tiga suku kata yaitu tin-jau-an yang menunjukkan arti, 1 hasil meninjau; pandangan; pendapat. (Hasil dari suatu tinjauan sesudah mempelajari dan menyelidiki sesuatu).⁹ 2 Perbuatan meninjau. Contohnya 1; buku itu banyak mengandung sejarah. Seseorang tahu tentang isi buku yang banyak mengandung sejarah karena sebelumnya mempelajari atau menyelidiki isi buku tersebut. Contoh 2; Dalam Adat Batak Toba itu, ada larangan pernikahan adat. Ini menunjukkan bahwa seseorang pernah melakukan tinjauan terhadap adat Batak Toba.

2. Hukum Islam

Defenisi Hukum menurut Ahli Ushul Fiqh adalah *Khithab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan.¹⁰ Dan kata Islam berasal dari bahasa “*arab*”, yang bersumber dari kata kerja “*salima*” yang bermakna kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri.¹¹ Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah: Istilah

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 123.

¹⁰ Syaikh Muhammad Al-Khudri Beik, *Ushul fiqh, Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.33.

¹¹ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Nanggro Aceh Darussalam: Nadiya Foondation, 2004), h.68.

“hukum Islam” sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali dalam Alqur’an, Sunnah dan literatur hukum Islam. Kata kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur barat. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, fiqh, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun dan lain lain.¹²

3. Hukum Pernikahan Adat

Hukum adalah tingkah laku masyarakat, yang merupakan aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh warga masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.¹³

Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁴

Menurut H. M. Sidin, istilah “adat” adalah suatu kebiasaan dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi.¹⁵

Jadi hukum perkawinan adat mempunyai arti aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.¹⁶

¹²Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h.18.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h.22.

¹⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1* (Medan, 2010), h.16.

¹⁵H.M.Sidin, *Asal Usul Adat Resam Melayu* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964), h. 6.

¹⁶Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta, Pradnya Paramita 1986), h. 67.

Adapun hukum pernikahan adat dalam penelitian ini adalah hukum pernikahan adat Batak Toba Desa Setia.

4. Masyarakat Batak Toba

Kata ini berasal dari terjemahan *society*, *community*, *people* dan *inhabitant*.¹⁷ Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok yang terorganisir secara besar atau banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu, memiliki tujuan yang sama, memiliki kesamaan identitas, teratur dan harmonis.¹⁸ Sedangkan Batak Toba adalah suku tertentu yang mempunyai aturan hukum adat, yang berada diwilayah Indonesia bagian Sumatera (Utara).¹⁹ Jadi masyarakat Batak Toba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai aturan hukum adat tentang larangan pernikahan adat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mendiskripsikan aturan pernikahan adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

¹⁷ S. Widiastuty, *Garand Kamus* (Surabaya: Apollo, tt),h.663.

¹⁸ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 47.

¹⁹ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986), h, 130.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan pernikahan adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
- c. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap “larangan pernikahan adat” masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

E. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1. Memberi kontribusi ilmiah, yaitu sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang larangan pernikahan adat pada masyarakat muslim Batak Toba.
- 2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba, sebagai upaya yang strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- 3. Memberi kontribusi pada masyarakat, terutama terhadap eksekutor hukum adat “larangan pernikahan adat” bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
- 4. Memberi masukan kepada pemerintah/Kementerian Agama agar mensosialisasikan dengan baik tentang “tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat dalam adat Batak Toba”.

F. Landasan Teori

Apabila hukum Islam dilihat dari signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat sekarang, maka ia harus ditelaah dari faktor pembentukan sikap dan kesadaran hukum tersebut, yaitu persepsi, pemahaman yang tepat, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.²⁰

Di Indonesia jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, banyak sekali hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pernikahan. Itu semua diakibatkan oleh kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Jika kita mau menghitung berapa banyak jumlah suku di Indonesia yang mana setiap suku pastinya memiliki hukum masing-masing. Dan pluralisme hukum perkawinan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:²¹

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agamanya (hukum perkawinan Islam).
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum perkawinan adat masing-masing.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya yang beragama kristen, berlaku hukum (ordonansi) perkawinan kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*) Stb. 1933 No. 74.

²⁰Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern* dalam “*Jurnal Hukum Islam*” Vol.III, h.3.

²¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Rineka Cipta, 2003),h. 182.

4. Bagi orang-orang Timur Asing, Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Lalu setelah tahun 1974 secara otomatis dalam unifikasi, hukum yang berlaku untuk bidang perkawinan Indonesia adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 disebutkan”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Huwelijken* S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S.1898 No.158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.²²

Dari penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 tersebut di atas, dinyatakan bahwa aturan hukum tentang pernikahan yang diatur selain dari

²²Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66* (Medan, 2010), h.29.

Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa aturan hukum adat yang ada dalam adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, terhitung setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seharusnya dalam masalah perkawinan, umat Islam hanya diatur oleh aturan hukum Islam. Karena aturan perkawinan hukum Islam yang ada di Indonesia, dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Apabila seseorang yang beragama Islam telah melaksanakan aturan hukum pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada, maka hal itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum Negara Indonesia. Sesuai dengan isi *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I (Hukum Perkawinan) Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.”²³ Landasan hukum ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I (Dasar Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁴

Dengan landasan hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat kita pahami bahwa perkawinan yang sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dan juga telah sesuai dengan “agama dan kepercayaannya”, pernikahan tersebut sudah sah menurut hukum Islam dan hukum negara kita. Oleh karena itu, tidak selayaknya suatu pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama (Islam) dan

²³Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 4 (Jakarta, Depag, 1991), h.17.

²⁴Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 16.

hukum negara Indonesia, dirusak dan dilarang oleh aturan hukum adat. Karena kedudukan hukum adat sangat lemah dibandingkan aturan Islam dan hukum negara. Aturan hukum Islam (*Kompilasi Hukum Islam*) dan hukum negara, bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan aturan hukum adat sama sekali tidak mengikat selama aturan hukum adat tersebut bertentangan dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum negara.

Melarang seseorang untuk menikah tanpa adanya aturan hukum Islam dan hukum negara yang nyata-nyata melarang hal itu, maka tindakan seperti itu dianggap kurang/tidak tepat. Karena seolah-olah ia telah melangkahi ketentuan hukum yang telah digariskan oleh aturan hukum agama (Islam) dan hukum Negara. Selayaknya larangan pernikahan itu hanya ada dalam aturan hukum Islam (hukum agamanya masing-masing) dan hukum negara. Kalau ada aturan lain yang melarang untuk menikah selain dua aturan di atas (hukum Islam dan hukum negara), aturan tersebut harus diselaraskan kembali dengan dua aturan tersebut di atas. Karena dua aturan hukum di atas diperhitungkan keabsahannya di mata hukum negara kita.

Dalam aturan hukum Islam ada ditentukan larangan pernikahan, yaitu pernikahan dengan *al-muharramat*. *Al-muharramat* yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara' (aturan hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan pernikahan dalam hukum Islam adakalanya dikategorikan dengan; 1). mahram jalur nasab, 2). mahram jalur susuan dan adakalanya juga dikategorikan dengan, 3). mahram jalur *mushaharah* atau kerabat semenda. Larangan Perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Negara Republik Indonesia adalah:

1. Fiqih klasik

a. Pengertian *Al-Muharramat*

Al-muharramat jama' dari kata "*mahram*", yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara' haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perkawinan terkadang diungkapkan dengan kalimat "Faktor-faktor yang mengharamkan pernikahan. Yang dimaksud "haram " dalam pembahasan ini, adalah pernikahan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah. Sebab kata "haram" kadang juga digunakan untuk merujuk arti "berdosa tapi sah".²⁵ seperti dalam kasus menikahkan wanita yang ada dalam pinangan orang lain.

Keharaman untuk dinikahi ada yang bersifat selamanya dan ada pula yang bersifat sementara.

b. Wanita-Wanita Yang Termasuk *Al-Muharramat*

1) Orang yang haram dinikahi dari jalur nasab:

Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena hubungan nasab:²⁶

1. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
3. Saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu;

²⁵ Wahbah Zuhayli, *AlFiqh al- Islam wa Adillatuh* (Damaskus; Dar al Fikr, 2004),h. Vol. 9, h.489.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab* Terj. *Al-fiqh 'ala al- Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.326.

4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, hingga keturunan di bawahnya.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan, hingga keturunan di bawahnya

2) Orang haram dinikahi dari jalur Susuan,

Orang haram dinikahi dari jalur susuan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa orang yang dinikahi dari jalur nasab, maka haram juga menikahnya dari jalur susuan.

3) Adapun yang dilarang karena sebab lain adalah berikut ini:

1. Empat dari jalur ikatan pernikahan (*Mushaharah*):²⁷
 - a. Ibu istri (mertua);
 - b. Anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya;
 - c. Istri ayah (ibu tiri) dan
 - d. Istri anak (menantu).
2. Menyatukan dua wanita "mahram" sebagai istri:
3. Anak Zina (Hanafi, Hambali dan Imamiyah).
4. Jumlah istri yang lebih dari 4 orang.
5. Istri yang di Li'an.

²⁷ *Ibid.*, h. 327.

6. Berbeda Agama.
7. Jumlah thalak telah terpenuhi.
8. Orang yang sedang Ihram

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan kawin disebutkan dalam Bab VI Pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:²⁸

- (1). Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2). Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusanya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*; dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3). Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

²⁸Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010),h. 174. Lihat juga *Kompilasi Hukum Islam*, h.23.

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa:

- (1). Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2). Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah *ditalak raj`i*, tetapi masih dalam masa iddah.

Dan dalam Pasal 42 disebutkan bahwa:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah

talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa ‘*iddah talak raj`i*’.

Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:

- (1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili`an*.
- (2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa ‘iddahnya.

Dan dalam Pasal 44 disebutkan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan disebutkan dalam Pasal 8 dan 9. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.(kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”. lihat redaksi Undang-undangnya).

Seperti pernyataan dalam pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam masalah perkawinan, orang Islam seharusnya hanya diatur oleh aturan hukum Islam. Karena aturan hukum Islam yang ada di Indonesia, di khususnya bagi orang yang beragama Islam. Apabila seseorang yang beragama Islam telah melaksanakan aturan hukum pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada, maka hal itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan) Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.”²⁹ Landasan hukum ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I (Dasar Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³⁰

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

³⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam adat masyarakat Desa Setia kecamatan Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara ada aturan hukum adat yang mengatur tentang “larangan perkawinan adat bagi masyarakat Batak Toba Desa Setia” adalah larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan itu ditujukan kepada semua orang, baik yang non muslim maupun kepada yang muslim. Larangan itu ditujukan bagi semua orang suku Batak Toba, tanpa memandang silsilah dan agama apapun yang dianut.

Larangan hukum adat yang sudah dianggap berkekuatan hukum tetap, ditentukan bahwa siapapun yang melanggar larangan pernikahan adat tersebut akan dikenakan sanksi dari akibat pelanggaran hukum adat tersebut.³¹ Dan sampai sekarang banyak dari kalangan umat Muslim Batak Toba sendiri menganggap hal itu sudah menjadi aturan hukum yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Sampai-sampai dalam masalah larangan perkawinan adat terhadap “*iboto/saudara/i* yang semarga dan yang sederajat dengan kita, dipahami oleh sebagian masyarakat Muslim Desa Setia lebih luas dari apa yang kita pahami menurut hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam, saudara itu hanya berkuat pada saudara yang terhitung mahram, baik kandung, sesusuan dan saudara tiri. Sedangkan saudara/i bagi umat Muslim Batak Toba Desa Setia, disamping termasuk dari tiga kategori di atas juga yang termasuk saudara adalah semua perempuan yang semarga dan sederajat.³² (Dan bagi sebagian orang, hampir dalam masalah yang membatalkan wudu’pun dianggap tidak batal apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang

³¹ Bisuk Siahaan, *Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu* (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 314.

³² Dalam tradisi Batak Toba, di samping seseorang punya marga, dia juga diberi nomor dari marga tersebut. Maksud sederajat adalah “senomor”. Misalnya, Penulis adalah Gultom Hutapea, nomor 17. Maka bisa jadi ada boru/wanita marga gultom yang senomor dengan penulis, itu maksud sederajat.

terhitung semarga karena dianggap saudari).³³ Bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, saudari semarga di luar mahram nikah, hampir sama hukumnya dengan saudara/i mahram nikah dalam pandangan hukum Islam.

Aturan hukum adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, melarang menikahi perempuan yang: Semarga (diluar mahram nikah menurut hukum Islam), *Namarpadan/padan*, *Namar Ito*, *Dua Punggu Sada Ihotan*, *Marboru Namboru* dan *Pariban Na So Boi Olion*. Padahal, tidak ada larangan nash Alquran, Hadis dan Ijma' Ulama untuk larangan tersebut. Dalam sebuah kaidah fiqih disebutkan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³⁴

Artinya: Asal segala sesuatu itu dibolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan boleh kita lakukan, sampai adanya dalil atau petunjuk (hukum agama Islam) yang menyatakan keharaman melakukan sesuatu itu.

Seharusnya seluruh lapisan masyarakat Batak Toba khususnya masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, mengetahui kedudukan hukum adat dalam pandangan hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Walaupun memang hukum adat itu diakui oleh hukum Islam dan hukum negara kita, akan tetapi kedudukan hukum adat itu sangatlah lemah dibandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) dan Instruksi Presiden (Inpres). Undang-undang Nomor 1

³³ Pengalaman pribadi penulis waktu mau melaksanakan shalat tarawih, namun waktu mau masuk masjid, tanpa sengaja penulis bersentuh kulit dengan seorang perempuan semarga yang bukan mahram, dan perempuan tersebut berucap "kitakan saudara/i dan dia tidak berwudu" kembali.

³⁴ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, *Kapita Selektta Islam* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h.59.

Tahun 1974 berstatus hukum sebagai Peraturan perundang-undangan, dan *Kompilasi Hukum Islam* berstatus sebagai Peraturan perundang-undangan atas Instruksi Presiden. Kekuatan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Dan kekuatan hukum Instruksi Presiden terhadap *Kompilasi Hukum Islam* tentang perkawinan juga mengikat, jika dilihat dari berlakunya *Kompilasi Hukum Islam* sebagai normatif. Karena *Kompilasi Hukum Islam* tertuang dalam Peraturan perundang-undangan.

G. Kajian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, ada satu tulisan sikripsi yang berbentuk penelitian pustaka yang dilakukan oleh Daniel Gefrina di Universitas Padjadjaran dengan judul” Pembatalan Perkawinan Semarga pada Masyarakat Adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Dalam tulisan tersebut menggambarkan bahwa, bentuk perkawinan masyarakat Batak Toba, bersifat *eksogami*, yaitu perkawinan antar sub marga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Batak Toba, sangat dilarang perkawinan satu marga karena hal tersebut dianggap perkawinan dengan saudara sendiri (*incest/marhanggi*). Pada masa dahulu, orang-orang yang melakukan hal tersebut segera dikucilkan atau diusir dari suatu komunitas (*huta*), dan komunitas lainnya juga biasanya menolak menerima menjadi warganya. Perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran adat Batak Toba karena perkawinan tersebut dilarang.

Dalam tulisan tersebut juga disebutkan “Berdasarkan hukum adat Batak Toba, kedudukan suami-isteri yang melakukan perkawinan semarga tidak sah dan

dapat dibatalkan karena melanggar aturan adat yang berlaku turun-temurun. Namun, bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Toba tetap sah dan mengikat, karena undang-undang perkawinan tidak mengaturnya. Undang-undang hanya mengatur, selama perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), maka perkawinan itu sah”.

Sedangkan penelitian penulis ini, hanya akan membahas dari hukum Islamnya saja. Penelitian penulis ini tidak hanya membahas tentang pernikahan semarga. Namun juga membahas tentang:

1. *Namarpadan/ padan* atau ikrar janji
- 2). *Dua Punggu Sada ihotan*: kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.
- 3). *Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang*: Larangan *Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang* adalah larangan jika laki-laki menikahi *boru* (anak perempuan) dari *namboru kandung* (saudari dari ayah kita) dan sebaliknya, seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari *tulang* kandungnya.
- 4). *Namarito: Namarito (ito)*, atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi.
- 5). *Pariban Na So Boi Olion*: Pariban yang tidak bisa saling menikah.

H .Metodologi Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

- a. Sifatnya adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai larangan pernikahan adat dalam masyarakat

Muslim Batak Toba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Setia Sirihit-rihit Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

- b. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris,³⁵ yakni dengan menelusuri bagaimana pelaksanaan hukum dalam masyarakat Muslim Batak Toba (Desa setia Sirihit-rihit).

2. Populasi, Sampel dan Informan

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, yang memiliki aturan hukum “larangan pernikahan adat”.

Oleh karena larangan pernikahan adat dalam masyarakat Batak Toba mempunyai karakteristik tersendiri, maka teknik pengambilan informan dan sampel yang paling mendekati adalah teknik *purposive informan and purposive sampling*.

b. Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, dan dengan menggunakan teknik yang paling mendekati adalah teknik *Purposive Informan*.

c. Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 3 orang responden. Dan dengan menggunakan teknik yang paling mendekati adalah teknik *Purposive Sampling*.³⁶

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2005), h.240.

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, Jakarta, 1996), h. 92.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Dengan mengambil data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang larangan pernikahan dalam adat Batak Toba.

b. Pengamatan terlibat (*Observation Participant*)

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti melibatkan diri kedalam berbagai aktifitas masyarakat setempat (Desa Setia). Kegiatan penelitian ini dilakukan secara intensif, melakukan interaksi sosial untuk menemukan pemahaman tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia.

c. Wawancara Mendalam (*Indepht Interview*)

Peneliti melakukan wawancara kepada:

- a. Tokoh masyarakat sebagai informan.
- b. Pelaku sekaligus korban larangan pernikahan adat Batak Toba sebagai responden.
- c. Pelaku pernikahan yang dilarang oleh adat Batak Toba sebagai responden.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library reseach*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (hukum Islam dan hukum adat) dan bahan hukum sekunder.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu menghimpun data primer dari informan dan responden dengan melakukan wawancara.³⁷

4. Instrumen / Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpul data yang dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumen dengan menggunakan *check list*, yaitu meneliti dan mempelajari serta menganalisa bahan kepustakaan.
- b. Wawancara (*interview*) langsung dengan 3 orang responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Dan bagi 6 orang informan juga menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁸ Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya akan dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penarikan kesimpulan.

Pada tahap persiapan, data primer dan data sekunder yang telah diperoleh akan diedit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh

³⁷Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997),h.71.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.103.

sudah mencukupi dan juga untuk menghindari kemungkinan terjadi data yang kurang lengkap.

Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Setelah melakukan analisis, maka kesimpulan yang didapat sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

6. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data adalah proses menyajikan data, yang sudah di analisis dari data-data yang telah diurutkan dan diorganisir kedalam suatu pola dan dari suatu uraian dasar dari analisis tertentu. Sehingga data-data tersebut dapat disajikan berdasarkan pola, kategori dan satuan uraian dasar yang sebelumnya sudah dianalisis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini diorganisasi dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki tekanan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Menjelaskan kerangka teoritis yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Wanita-Wanita Yang Haram Dinikah, Pengertian *Al-Muharramat*, Wanita-Wanita Yang Termasuk *Al-Muharramat*, Pandangan hukum Islam Terhadap adat, Integrasi Hukum Islam ke Hukum adat Batak Toba

Bab III Lokasi dan Objek Penelitian, Sejarah Singkat Desa Setia, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Letak Desa Setia, Pemukiman, Letak Demografis, Tingkat Pendidikan, Agama, Mata Pencaharian Pola Masyarakat, Tahapan Adat Pernikahan Batak Toba, Acara Pesta Pernikahan Adat Batak Toba

Bab IV akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang: Aturan Pernikahan Adat bagi Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, Faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba, Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia dan Analisis

Bab V merupakan bab terakhir kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wanita-wanita yang Haram Dinikahi

Dalam peraturan (hukum) agama Islam dan peraturan negara Indonesia, sebelum melangsungkan pernikahan perlu diperhatikan syarat dan rukun suatu pernikahan. Apabila syarat dan rukun suatu pernikahan telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan syah oleh hukum agama Islam dan syah menurut hukum negara Indonesia.

Dalam hukum Islam dan hukum negara Indonesia, termuat aturan tertentu terhadap seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, harus memperhatikan siapa wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Salah satu syarat pernikahan dalam hukum Islam dan hukum negara Indonesia adalah dilarangnya seseorang menikah dengan wanita yang tergolong dalam *al-muharramat*. *Al-muharramat* yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara' (aturan hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

Larangan pernikahan dalam hukum Islam adakalanya dikategorikan dengan; 1). mahram jalur nasab, 2). mahram jalur susuan dan adakalanya juga dikategorikan dengan, 3). mahram jalur *mushoharah* atau kerabat semenda.

B. Pengertian *Al-Muharramat*

Al-muharramat adalah *jama'* dari kata "*Mahram*", yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara' (hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-

laki.³⁹ Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perkawinan terkadang diungkapkan dengan kalimat “faktor-faktor yang mengharamkan pernikahan”. Maksud haram dalam pembahasan ini adalah, pernikahan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah. Sebab kata “haram” terkadang juga digunakan untuk merujuk arti “berdosa tapi sah”.⁴⁰ Seperti dalam kasus menikahkan wanita yang ada dalam pinangan orang lain. Keharaman untuk dinikahi ada yang bersifat selamanya dan ada pula yang bersifat sementara.

C. Wanita-Wanita Yang Termasuk *Al-Muharramat*.

Adapun larangan pernikahan menurut hukum Islam klasik, *Kompilasi Hukum Islam* dan hukum Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

A. 1. Versi Fiqih klasik

a. Wanita yang haram dinikahi karena nasab:

Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena hubungan nasab:⁴¹

1. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
3. Saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu;
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, hingga keturunan di bawahnya.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan, hingga keturunan di bawahnya

³⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Syarah al-Bajuri* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 2005), Juz II, h. 154-164.

⁴⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus; Dar al Fikr, 2004), h. Vol. 9, h.492.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.327. Lihat Ibrahim al-Bajuri, *Syarah al-Bajuri* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 2005), Juz II, h. 154-165. Lihat juga

b. Wanita yang haram dinikahi karena Susuan,

Orang haram dinikahi dari jalur susuan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa orang yang dinikahi dari jalur nasab, maka haram juga menikahnya dari jalur susuan. Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena susuan.⁴²

1. Ibu susu, termasuk juga nenek persusuan yaitu ibu dari ibu atau bapak persusuan, juga ibu-ibu mereka ke atas.
2. Anak perempuan dari ibu susu, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan sepersusuan, baik dia saudara kandung, seapak maupun seibu.
4. Saudara perempuan bapak susu (bibi), termasuk saudara perempuan kakek susu (bibi dari bapak/ayah susu) dan seterusnya ke atas baik kandung, seayah atau seibu.
5. Saudara perempuan ibu susu (bibi), termasuk saudara perempuan nenek susu (bibi dari ibu susu) dan seterusnya ke atas baik kandung, seayah atau seibu.
6. Putri saudara perempuan sesusuan (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah.
7. Putri saudara laki-laki sesusuan (keponakan) cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah.

c. Wanita yang haram dinikahi karena sebab lain adalah berikut ini:

- a. Empat dari jalur ikatan pernikahan (*Mushahahar*):⁴³
 1. Ibu istri (mertua);
 2. Anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya;
 3. Istri ayah (ibu tiri).
 4. Istri anak (menantu).
- b. Menyatukan dua wanita "mahram" sebagai istri:
- c. Anak zina (Hanafi, Hambali dan Imamiyah).
- d. Jumlah istri yang lebih dari 4 orang.
- e. Istri yang di li'an.
- f. Berbeda agama.
- g. Jumlah thalak telah terpenuhi.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.327. Lihat Abdul-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah* (Jaziri, Abdur-Rahman. *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid IV, h. 23-30. Lihat juga Ibrahim al-Bajuri, *Syarah al-Bajuri* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 2005), Juz II, h. 251-256. Lihat Juga Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), Juz II, h.26-30.

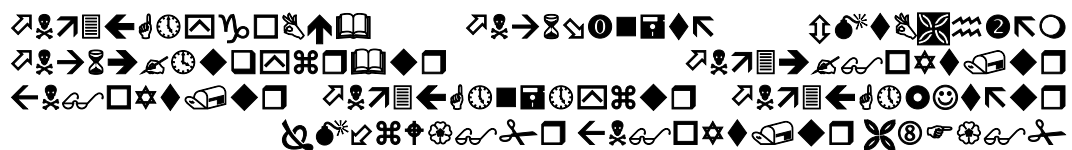
⁴³ *Ibid.*, h.327.

h. Orang yang sedang Ihram

Argumentasi hukum yang digunakan oleh ulama fiqh klasik dalam menetapkan wanita-wanita yang menurut syara' haram dinikahi oleh seorang laki-laki/ mahram adalah:

1. Wanita yang haram dinikahi sebab hubungan Kekerabatan atau Nasab.

Yang disebabkan hubungan kekerabatan ini sebagaimana rincian yang di atas yakni; ibu kandung ke atas (nenek, ibu nenek seterusnya); anak perempuan kandung ke bawah (cucu, anak cucu seterusnya); saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu; saudara perempuan bapak; saudara perempuan ibu; anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah:



Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; (An-Nisa : 23).*

Menurut ijma' ulama (Hanafi, Hambali dan Imamiyah), seorang wanita haram menikah dengan anak zinanya. Perbedaan antara anak sah dengan anak zina ialah bahwa anak zina itu seolah-olah seperti bagian dari tubuh ibunya kemudian terpisah menjadi manusia. Ini tidak sama dengan sperma yang menjadi asal kelahiran, sehingga anak perempuan yang sah dinisbahkan kepada ayahnya.⁴⁴

⁴⁴ Abdul-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah* (Jaziri, Abdur-Rahman. *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid IV, h. 23-30.

2. Wanita yang haram dinikahi yang disebabkan Hubungan Susuan

Ada tujuh wanita yang haram dinikahi sebab susuan, ini masih berkaitan dengan faktor nasab sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dasarnya yakni firman Allah:



Artinya: “Dan (diharamkan atas kalian) ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari penyusuan.” (An-Nisa:23).

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Menjadi haram dengan sebab penyusuan apa yang haram karena hubungan nasab”.⁴⁵

1) Susuan yang mengharamkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua macam hisapan akan mengharamkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ada batas tertentu dari susuan yang mengharamkan. Susuan yang mengharamkan ialah susuan dalam waktu tertentu. Penyusuan sehisap dua hisap tidak mengharamkan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

لا تحرم المصة ولا المصتان.⁴⁶

“Tidak mengharamkan satu kali hisapan dan tidak (pula) dua kali hisapan”.

(H.R.Muslim).

Untuk kepastian hukum perlu ditetapkan jumlah hisapan yang menyebabkan larangan perkawinan.⁴⁷ Dalam hal ini Imam Syafi’i menetapkan lima kali hisapan yang mengharamkan, berdasarkan hadis:

⁴⁵ Muhammad Ibin Hajr Al-Kannany Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Bandung: Dahlan, 1926),h.213.

⁴⁶ *Ibid*,h.213.

عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمسة معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقران من القرآن.⁴⁸

“Dari ‘Aisyah r.a, beliau berkata: dahulu diantara (ayat-ayat) yang diturunkan (terdapat kata-kata: sepuluh susuan yang diketahui. Kemudian kata-kata: lima hisapan yang diketahui,lalu Rasulullah SAW. wafat, sedang kata-kata itu termasuk yang dibaca”. (H.R. Muslim,Abu Daud dan Nasi’i)

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa susuan yang tidak mengharamkan ialah yang kurang dari tiga kali hisapan, sesuai dengan hadits di atas, sedangkan menurut Imam Malik, susuan yang dilakukan tiga kali hisapan atau lebih adalah susuan yang mengharamkan pernikahan.⁴⁹

2) Air susu yang bercampur dengan benda atau cairan yang lain.

Menurut Hanafiah air susu yang bercampur dengan cairan atau benda lain tidak mengharamkan. Sedangkan Syafi’iyah beserta sebagian pengikut Imam Malik mengharamkan. Dalam hal ini yang menjadi sebab yang mengharamkan ialah air susunya sendiri, percampuran dengan benda lain tidak akan merubah sifat air susu tersebut. Karena itu air susu yang bercampur dengan benda-benda atau cairan yang lain tetap mengharamkan. Hanya saja perlu ditetapkan ukuran atau berapa banyak air susu yang dicampurkan itu. Ukuran yang mempunyai dasar nash, ialah ukuran yang banyaknya sebanyak air susu tiga hisapan (Imam Malik).⁵⁰

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h. 341.

⁴⁸ Muhammad Ibin Hajr Al-Kannany Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Bandung: Dahlan, 1926),h.h.216.

⁴⁹ Abdul-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba’ah* (Jaziri, Abdur-Rahman. *al-Fiqh ‘alal-Madzahib al-Arba’ah*.(Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid IV, h. 23-30. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.326-329.

⁵⁰ *Ibid.,*

Demikian pula halnya air susu yang tidak langsung masuk kedalam mulut si anak, tanpa menghisap susu dari ibu susuan. Cara demikian tetap mengharamkan, kecuali ibu yang mempunyai air susu itu tidak diketahui. Agar ada kepastian hukum hendaknya diadakan pencatatan tentang air susu siapa yang telah diminum oleh si anak itu.⁵¹

Ada pula penyusuan yang air susu tidak masuk kedalam kerongkongan atau perut si anak. Kalau terjadi demikian dan dapat dibuktikan, maka penyusuan yang demikian itu tidak mengharamkan.

3) Masa menyusui

Sepakat para ahli fiqh bahwa masa menyusui seorang anak itu ialah dua tahun, bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan susuan anaknya. Berbeda pendapat para ahli fiqh tentang akibat menyusukan seorang anak setelah lewat umur dua tahun. Jumhur ulama' fiqh termasuk didalamnya Imam Malik, Imam Syafi'i tidak mengharamkannya. Sedang daud zahiri dan imam abu Hanifah mengharamkannya. Sebab perbedaan pendapat itu karena berbeda pengertian mereka dalam memahami hadis-hadis Nabi yaitu:

عن ابن شهاب انه سئل عن رضاع الكبير فقال: اخبرني عروة بن زبير بحدث، امر رسول الله

صل الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها.⁵²

“Dari Syihab, bahwasanya ia ditanya tentang penyusuan orang besar, maka ia menjawab: Urwah bin Zubair telah mengkhabarkan kepadaku sebuah hadis. Yaitu, Rasulullah saw. telah menyuruh Sahlah binti Suhail menyusukan Salim, maka ia lakukan, dan ia memandang Salim sebagai anaknya.” (H.R. Malik)

⁵¹ Ibid.,

⁵² Muhammad Ibin Hajr Al-Kannany Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Bandung: Dahlan, 1926), h.214.

Hadis kedua:

عن عائشة قالت: دخل رسول الله صل الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله, انه اخي من الرضاعة, فقال صل الله عليه وسلم: انظرن من اخوانكم من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة.⁵³

Berkata sayidatuna ‘Aisyah r.a: “*Rasulullah telah masuk rumahku dan aku mempunyai (tamu) seorang laki-laki, maka keadaan demikian mengganggu Nabi dan aku lihat (tanda) kemerahan di wajah Nabi. Lalu saya berkata: “ya Rasulullah, sesungguhnya dia ini adalah saudaraku sepesusuan” berkata Rasulullah SAW: “telitilah orang yang menjadi saudara sepersusuan, sesungguhnya yang menjadi saudara sepesusuan itu adalah (sama-sama menyusu) karena lapar.”*

Kalau diperhatikan sebenarnya kedua hadits diatas tidak berlawanan. Hadits pertama menerangkan bahwa menyusukan orang besar berakibat halangan perkawinan. Sebagaimana yang telah dilakukan salim dengan istri abu hudzaifah berdasarkan perintah Rasulullah.

Antara Salim dan Abu Huzafah dan istrinya telah terjalin kasih sayang, hubungan seperti seorang anak dengan orang tuanya. Untuk mengadakan hubungan dan pergaulan yang bebas antara mereka, seperti hubungan orang antara seorang dengan mahramnya tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu mereka menayakan itu kepada Rasulullah. Berdasar hadis pertama kalau keadaan benar memerlukan, maka penyusuan orang besar dapat mengakibatkan halangan perkawinan. Adapun hadis ke-dua menerangkan bahwa pada dasarnya susuan yang mengharamkan itu ialah susuan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar anak. Orang yang telah besar tidak memerlukan air susu lagi untuk menghilangkan rasa lapar. Karena itu susuan tidak berfaidah lagi baginya dan tidak mengharamkan pernikahan. Hadis ke-dua menerangkan asas penyusuan

⁵³*Ibid..*

sedang hadits pertama memberikan jalan keluar atau cara untuk mengatasi kesulitan, sebagaimana yang dialami oleh Abu Hudzaifah dan istrinya dengan Salim.⁵⁴

4) Persaksian atas persusuan.

Sepakat para ahli fiqh bahwa diperlukan adanya saksi-saksi yang menyaksikan pelaksanaan suatu penyusuan. Berbeda pendapat para ahli fiqh dalam menetapkan jumlah minimum saksi yang diperukan.

Karena persaksian penyusuan dapat disamakan dengan saksi *mu'amalat*, maka jumlah saksi yang minimum itu adalah dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki dibolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasar firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah:282:



Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”

Imam Syafi’i membolehkan persaksian susuan itu diakukan oleh empat orang wanita sebagai ganti dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita.⁵⁵

5) Hikmah larangan nikah karena sesusuan

Hikmah diharamkannya pernikahan karena sesusuan ini adalah karena sebenarnya tubuh si anak terbentuk dari air susu ibu yang menyusuinya dan si

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.326-329.

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h. 341. Lihat juga Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiyyi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), Juz II, h. 29.

anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri. Anak susunya seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi mahramnya, inilah rahasia haramnya. Hikmah lain yaitu untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

3. Yang disebabkan hubungan pernikahan

Ada empat orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan pernikahan. Mereka adalah:

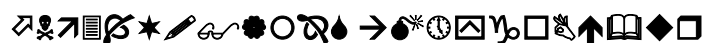
- a. Istri ayah (ibu tiri), sesuai dengan firman Allah:



Artinya : *"dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, terkecuali pada masa lampau (masa jahiliyah). Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".(Qs.An-Nisa' :22)*⁵⁶.

- b. Ibu istri/mertua (begitu pula neneknya), anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya, dan istri anak (menantu).

Keharaman ini berlaku begitu akad terjalin, sebagaimana firman Allah:



Artinya: *" (dan diharamkan bagimu) ibu-ibu istrimu (mertua); (Q.s. An-Nisa: 23).*

⁵⁶ Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22.

dihimpun tersebut maka nikah kedua-duanya batal. Sebab tidak ada yang lebih utama satu dari yang lain. Jika akad nikahnya dilaksanakan berurutan maka akad yang pertama sah dan yang kedua batal.⁵⁸

Haram untuk mengumpulkan (menikahi dalam waktu bersamaan) antara 2 wanita bersaudara. Dasar hukumnya ialah firman Allah Q.s. An-Nisa': 23.

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
Artinya: “dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (Qs. An-Nisa': 23).⁵⁹

Demikian juga haram mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
Artinya: “Tidak dikumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya dan tidak pula dengan bibi dari ibunya” (Mutafaq 'Alaih).⁶⁰

2. Pengharaman sebab menghimpun lebih dari empat istri

Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat wanita saja, berdasarkan firman Allah.:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْعَلُونَ مِمَّا قَدْ حَلَاقُوا بِالنِّسَاءِ أَهْلًا بِالنِّسَاءِ ۚ فَإِذَا حَلَاقُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّاجِدِينَ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ أَصْنَافٍ ۚ الْأُولَى الَّذِينَ ظَفَرُوا بِهِمْ يَرَوْنَهَا كَرَاهٍ ۖ وَالثَّانِي عَلَىٰ حَدٍّ مِنْهُمْ أَلَّا يَسْتَنكِفُوا بِهَا لِبَاسَهُمْ وَلَا لِيَوْمٍ يَكُونُوا فِيهَا مِنْ لَدُنْهُمْ ۚ وَالْأُولَىٰ عَلَيْهِمْ غَلَابَةٌ ۚ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman janganlah menjadikan orang-orang yang telah berzina dengan perempuan-perempuan itu sebagai keluarga bagi perempuan-perempuan itu. Dan apabila berzina dengan perempuan-perempuan itu, maka orang-orang beriman yang sujud kepada Allah terdapat tiga golongan. Golongan pertama: orang-orang yang telah berzina dengan mereka, mereka melihatnya dengan perasaan tidak suka, dan golongan kedua: orang-orang yang berdiri di sisi mereka, agar mereka tidak memakai pakaian mereka menutupi aurat mereka dan agar mereka tidak menjadi bagian dari mereka pada suatu hari. Dan golongan pertama: mereka mempunyai kekuasaan atas mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab Terj. Al-Fiqh 'ala al- Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h. 341. Lihat juga Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), Juz II, h. 31 .

⁵⁹ Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23.

⁶⁰ Muhammad Ibin Hajr Al-Kannany Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Bandung: Dahlan, 1926), h.124.

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.*(Q.S. an-Nisa: 3).⁶¹

Apabila ada seseorang menikahi lima wanita sekaligus (sekali akad nikah), maka semua pernikahan itu batal mengingat tidak ada yang lebih utama antara yang satu dengan yang lainnya. Jika pernikahannya berurutan, maka pernikahan yang kelima batal dan yang empat itu sah.

5. Anak zina (Imam Hanafi, Hambali dan Imamiyah).

Ketiga Imam tersebut berpendapat, anak perempuan hasil jina, haram dinikahi sebagaimana keharaman anak perempuan kandung. Sebab anak perempuan tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Dan dari segi pandangan *‘urf* anak yang lahir adalah anaknya sendiri. Tapi menurut pendapat Imam Syafi’i dan Maliki, berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya dari hasil jina. Sebab secara syar’i anak tersebut bukan mahram.⁶²

6. Istri yang di li’an.

Apabila seorang suami menuduh istrinya berjina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhan itu, dan suami tidak punya bukti bagi tuduhan itu. Maka si suami boleh melakukan sumpah *Li’an* terhadap istrinya. Si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia termasuk orang yang benar. Kemudian pada sumpahnya yang ke-lima dia hendak mengatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya mana kala dirinya termasuk orang yang

⁶¹ Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3.

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h. 330.

berbohong. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa kedua (suami-istri) wajib berpisah sesudah mereka berdua saling *mula'anah*.⁶³

7. Berbeda agama.

Para ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh nikah dengan orang yang berbeda agama, kecuali berbeda agama dengan ahli kitab. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, tapi tidak sebaliknya.⁶⁴

Berdasarkan dari dalil berikut:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن⁶⁵

Artinya: *dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.* (Q.s. Al-Baqarah: 221).

8. Jumlah Thalak telah terpenuhi.

Para ulama mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kali, yang didahului oleh dua kali talak *raj'i*, maka haramlah istrinya itu baginya sampai ada laki-laki lain yang mengawini wanita tersebut.⁶⁶

9. Dalam keadaan Ihram

Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa baik ihram haji atau umrah, tidak boleh nikah, dan menikahkan. Bila pernikahan dilakukan dalam keadaan ihram maka pernikahan tersebut batal.⁶⁷

⁶³ *Ibid*, h. 333.

⁶⁴ *Ibid*, h. 335.

⁶⁵ Q.s. Al-Baqarah: 221

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.335.

⁶⁷ *Ibid*, h.344.

A. 2. Versi *Kompilasi Hukum Islam*

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* larangan kawin disebutkan dalam Bab VI Pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:⁶⁸

(1) **Karena pertalian nasab :**

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) **Karena pertalian kerabat semenda :**

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul* dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) **Karena pertalian sesusuan :**

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam pasal 40 disebutkan, bahwa: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal 41 disebutkan bahwa:

- (1). Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

⁶⁸Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h.176-177.

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

- (2). Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj`i*, tetapi masih dalam masa iddah.

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri, yang ke-empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah talak raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah *talak raj`i*.

Dalam pasal 43 disebutkan bahwa:

- (1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Dalam pasal 44 disebutkan, bahwa:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

A. 3. Versi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan disebutkan dalam Pasal 8 dan 9. (Lihat pembahasan

sebelumnya tentang syarat perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).⁶⁹

D. Pandangan hukum Islam terhadap adat

Agama Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam. Kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum Islam ada yang tertuang dalam sunnahnya yang mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Untuk itu sangatlah penting bagi kita orang Islam untuk mengetahui dan mengaplikasikan salah satu metode *istinbat hukum* yang pernah di pakai oleh Nabi Muhammad SAW.

‘*Urf* digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu dalam merancang produk hukum Islam, adalah untuk memudahkan dalam meng-*Istinbathkan* (menetapkan) suatu hukum. Meng-*istinbathkan* hukum dalam setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh seiring perkembangan zaman. Berikut penjelasan tentang ‘*urf*:

1. Pengertian Adat atau ‘Urf

Urf menurut bahasa berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁷⁰

‘*Urf* secara istilah menurut Abdul Wahhab Khallaf, adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, pantangan-

⁶⁹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h.18-19.

⁷⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*” (Jakarta: Amzah, 2009), h. 167.

pantangan, adalah termasuk juga ‘*Urf* (adat).⁷¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, antara *uruf* dan (hukum) adat adalah sama.⁷²

2. Kaidah yang berlaku bagi ‘*urf*

Adapun kaidah-kaidah tentang *urf* adalah sebagai berikut:

- a. Adat dapat dijadikan hukum:

العادة المحكّمة⁷³

Artinya: “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

- b. Perkara yang belum ada aturan yang mengatur secara jelas maka dikembalikan ke dalam ‘*urf*:

كل ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya: “semua yang datang dari syara’ namun belum ada aturan (yang jelas) dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada ‘*urf*”.⁷⁴

- c. Apa yang ditetapkan melalui *urf*, hampir sama dengan ketetapan nash:

الثابت بالعرف كالثابت بالنّاصّ

Artinya: “yang ditetapkan melalui ‘*urf* sama dengan yang ditetapkan melaui nash (*Alqur’an* dan *Hadis*)”.⁷⁵

- d. Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat:

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah mengemukakan pendapatnya bahwa tak dapat diingkari adanya perubahan hukum dengan seiringnya perubahan waktu dan tempat, seperti dalam kaidah berikut ini:

تغير الأحكام بتغير الأزمان و الأمكنة

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Qolam, 1978), h.63.

⁷² *Ibid.*, h.63.

⁷³ *Ibid.*.

⁷⁴ Muchlis Usman, *Kaidah kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), cet. Ke-4, h. 142.

⁷⁵ Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), cet. Ke-1, h.143.

Artinya: *Adanya perubahan hukum dengan seiringnya perubahan waktu dan tempat.*⁷⁶

Maksudnya adalah bahwa hukum fiqih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, akan berubah hukumnya jika adat istiadat itu berubah, misalnya salah satu syarat saksi yang baik adalah yang memiliki sifat adil, namun yang jadi permasalahan adalah kriteria adil menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tentu berbeda-beda, seperti dalam suatu masyarakat ketika seseorang dengan kepala terbuka (tanpa penutup kepala) itu dipandang tidak menjaga *mur'ah* yang merupakan syarat untuk menjadi adil, namun dalam masyarakat yang lain penutup kepala bukan syarat bahwa seseorang itu bersifat *mur'ah* yang juga sebagai syarat sifat adil.⁷⁷

3. Macam-macam `Urf

Berdasarkan keabsahannya, `Urf ada dua macam, yaitu:⁷⁸

1. `Urf yang sah, dan
2. `Urf yang fasid.

`Urf yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

⁷⁶ Muchlis Usman, *Kaidah kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), cet. Ke-4, h. 142.

⁷⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-3, h. 153-158.

⁷⁸ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 237.

Adapun *'urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

4. Syarat-syarat '*uruf* untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum:

Adapun syarat-syarat *urf* untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih, yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Hadis,
2. '*Urf* itu harus bersifat umum, yang telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut.
3. '*Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang dipermasalahkan.
4. Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat (tidak maksiat).
5. Perbuatan itu telah dilakukan berulang-ulang dan mendarah daging pada masyarakat tertentu.
6. Tidak membawa mudharat serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

5. Kehujjahan '*Urf*

Dalam penetapan hukum Islam, *urf* dapat dipertimbangkan untuk jadi sebuah produk hukum. Karena sebagian hukum Islam itu ditetapkan dari produk *urf* yang masih dapat diterima untuk jadi sebuah hukum (Islam). Dapat diterima jadi sebuah produk hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan dalil

⁷⁹ *Ibid.*, 238-239.

nash (Alquran dan Hadis). Contohnya, seperti kebiasaan manusia berjual beli secara *ta'thi* (saling memberi tanpa mengucapkan ijab dan qabul), transaksi dengan cara pesanan, *urf* ini dapat ditetapkan jadi sebuah hukum (Islam).⁸⁰

Adapun golongan ulama yang menggunakan *'urf* ini sebagai bagian dari rancangan penetapan hukum Islam adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah.⁸¹ Dua golongan ini mendasari dalil kehujjahan *urf* sebagai bagian dari rancangan penetapan produk hukum Islam berdasarkan dalil-dalil berikut: Rasulullah SAW. bersabda:

ما رأه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah”. (H.R. Imam Ahmad dan Nasa’i)⁸²

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan pada adat kebiasaan orang Islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah juga baik, dan dapat diamalkan.⁸³ Dari itu, dapat kita pahami bahwa *urf* yang berstatus shahih dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁸⁴

E. Integrasi hukum Islam ke hukum adat Batak Toba

Hukum Islam sangat memperhatikan tradisi dalam suatu masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam.

⁸⁰ Sarmin Syukur, *Sumber sumber Hukum Islam* (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), cet. I, h.208.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Sayyid Ahmad Al-hasyimy, *Mukhtar al- Hadits al- Nabawi* (Surabaya: Harmain, tt.),h. 146.

⁸³ Sarmin Syukur, *Sumber sumber Hukum Islam* , h. 206.

⁸⁴ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. IV, h. 237.

Kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum Islam ada yang tertuang jadi produk hukum fiqh yang berasal dari *urf*. Contohnya, mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. '*Urf* (adat) ini sah dan saling dikenal dalam tradisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', dan dalam adat ini tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Adapun integrasi hukum Islam dan hukum adat Batak Toba dapat kita lihat sebagai berikut, misalnya hukum Islam sangat melarang menikah dengan wanita-wanita tersebut di bawah ini, haram dinikahi karena;

1). hubungan nasab:⁸⁵

1. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
3. Saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu;
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, hingga keturunan di bawahnya.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan, hingga keturunan di bawahnya

Aturan hukum adat Batak Toba juga menetapkan larangan yang sama dengan aturan hukum Islam.

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.326.

2). Karena jalur susuan,

Orang haram dinikahi dari jalur susuan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa orang yang dinikahi dari jalur nasab, maka haram juga menikahnya dari jalur susuan. (Dalam pembahasan tentang susuan, aturan hukum adat Batak Toba tidak ada mengatur mengenai hal ini).

3). Karena sebab lain adalah berikut ini:

Empat dari jalur ikatan pernikahan(*Mushaharah*):⁸⁶

1. Ibu istri (mertua);
2. Anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya;
3. Istri ayah (ibu tiri).
4. Istri anak (menantu).

Dalam tradisi suku Batak Toba, ada juga larangan pernikahan seperti berikut ini:⁸⁷

1. *Inang Pangintubu Ni Iba*/Ibu Kandung.
2. *Inang Panoroni*/Ibu tiri.
3. *Inang ni Amaniba (Ompung boru)*/Nenek.
4. *Inang panoroni ni Amangniba*/Nenek tiri.
5. *Boru ni Amaniba (iboto niba sandiri)*/Saudara Kandung.
6. *Iboto ni Amaniba (Namboruniba)*/Saudara Perempuan Ayah.
7. *Boru ni Iboto niba(bere)*/Putri dari saudara perempuan.
8. *Parumaenniba*/Menantu..

⁸⁶ *Ibid*,h.327.

⁸⁷ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutahut, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan "*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*" (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 75-109. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197-209.

9. *Boru ni Amangtua manang Amanguda niba*/Putri dari saudara laki-laki ayah.
10. *Nioli ni Tunggane niba naung mabalu (Inangbaoniba)*/Istri dari *Tunggane*.
(tunggane adalah kebalikan dari *Lae*).
11. *Boru ni Namboruniba*/Putri dari Saudara Perempuan Ayah.
12. *Nantulang manang Nantulang panoroni*/Istri *Tulang*.
13. *Boru ni Dongan Samarga dohot Iba*/ anak perempuan dari teman semarga
(Satu Marga).
14. *Boru naniain* (adopsi)/Saudara hasil Adopsi orang tua.
15. *Napareakkon Boru-boru namabalu anggo so salpu dope tingki haroanna atik naung marisi bortianna*. /Menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan).
16. *Boru-Boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)*/Istri Teman).
17. *Boru-boru namandiori parlindungan ala marbadai dohot sinondukna*./
Perempuan yang mencari perlindungan karena cecok dengan suaminya.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa ternyata dalam tradisi suku Batak Toba yang di poin 1-8, juga melarang apa yang dilarang oleh hukum Islam. (Lihat pembahasan sebelumnya di bab 1 dalam pembahasan semua yang dilarang menikah menurut aturan hukum adat Batak Toba).

Kalau kita kaitkan dengan semua jumlah orang yang dilarang menikah dalam hukum adat Batak Toba, ini semua hampir sesuai dengan aturan hukum Islam. Dan bahkan oleh hukum adat Batak Toba seperti yang di poin 13 di atas, memandang lebih luas lagi dari apa yang kita pahami dalam hukum Islam. Semua yang semarga dengan kita dilarang untuk dinikahi, walaupun sudah diluar mahram yang ditentukan oleh hukum Islam.

Apakah hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Batak Toba ini, dipengaruhi oleh hukum Islam atau tidak?. Ini jawabannya tergantung dari sejarah, mana yang lebih dahulu lahir kepermukaan bumi ini, apakah hukum adat Batak Toba, atau hukum Islam?. (Karena sejarah awal dan asal mula suku Batak Toba belum dapat dipastikan kapan lahir kepermukaan bumi ini, dan masih banyak silang pendapat tentang ini). Kalau kita memandang bahwa hukum Islam yang muncul pertama kali, ada kemungkinan bahwa hukum Adat batak Toba termasuk dipengaruhi oleh hukum Islam. Dan sebaliknya, apabila yang lebih dahulu muncul kepermukaan bumi ini adalah hukum adat Batak Toba, maka alangkah hebatnya hukum adat Batak Toba itu terhadap kesesuaian hukumnya dengan hukum Islam.

BAB III

LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Setia

Sebelum masa penjajahan belanda desa Setia ini sudah lama berdiri. Bahkan masyarakat yang tinggal di Desa Setia yang sekarang ini, sudah termasuk generasi ketujuh bahkan lebih, terhitung semenjak didirikannya desa ini.

Dari zaman dahulu Desa Setia ini terdiri dari dua desa, yaitu desa Aek Botik dan Desa Sirihit-rihit. Namun karena masyarakat yang berada di dua desa ini masih tergolong saudara, maka mereka sepakat untuk menyatukan dua desa ini menjadi satu desa yaitu “Desa Setia”. Setelah bergabungnya kedua desa ini, menjadi desa Setia, desa ini tetap dipimpin oleh satu kepala desa dari dahulu hingga sekarang. Dan kini gabungan dua desa yang menjadi Desa Setia dipimpin oleh bapak Ramlan Siregar.⁸⁸

B. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Letak Desa Setia

Desa Setia ini merupakan Desa yang jumlah penduduknya berjumlah 1134 jiwa. Dan wilayah Desa Setia mempunyai luas 2400 m². Terdiri 2 dusun, yaitu Dusun Aek Botik dan Dusun Sirihit-rihit. Namun oleh penduduk setempat, dusun ini tetap dinyatakan sebagai desa bukan sebagai dusun.

Letak wilayah Desa Setia ini merupakan desa yang berada di atas dataran tinggi yang berada di tengah-tengah desa di sekitar Kecamatan Pahae Jae, dan dikelilingi dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan wilayah sekitarnya.

⁸⁸Wawancara di rumah Kepala Desa pada tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 2 April 2014 bersama Bapak Ramlan Siregar selaku Kepala Desa Setia.

Tabel 1⁸⁹**Batas wilayah Desa Setia**

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Nahornop Marsada (Aek Bulu /Sarulla)
2.	Sebelah Selatan	Suka Maju
3.	Sebelah Barat	Purba Tua (Kec. Purba Tua)
4.	Sebelah Timur	Lobu Sihim

Seperti desa-desa yang lain, Desa Setia terbagi dalam 2 Dusun, dengan jarak masing-masing dusun saling berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 7 sampai 10 menit berjalan kaki. Jumlah keluasan dari 2 dusun yang ada pada Desa Setia ini 2400 m², dengan jumlah totalitas persentase terhadap luas Kecamatan 100.00 %.

Untuk lebih jelasnya, gabungan dari dua dusun ini yang akan menjadi lokasi penelitian peneliti, yakni Desa Setia. Dapat dilihat pada data yang akurat pada tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 2⁹⁰**Luas wilayah Desa Setia**

No	Nama Dusun	Luas (m ²)
1	Aek Botik	1050
2	Sirihit-rihit	1350
	Jumlah	2400 m ²

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Desa Setia ini memiliki daerah yang cukup luas dibandingkan desa tetangga lainnya. Karenanya

⁸⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Dalam Angka 2014, h. 3

⁹⁰*Ibid*, 2014, h.7.

kepadatan penduduk dan pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan keluasan wilayah yang dimiliki Desa Setia ini sehingga masih tetap menimbulkan kenyamanan lokasi.

Sementara jarak tempuh antar Dusun Sirihit-rihit menuju Kecamatan Pahae Jae, lebih lama memakan waktu dibandingkan dengan Dusun Aek Botik. Sedangkan jarak terendah adalah Dusun Aek Botik dengan maksimal waktu 10 menit naik kendaraan bermotor. Seperti yang terlihat jelas pada tabel berikut.

Tabel 3⁹¹

Jarak kantor Desa Setia ke kantor camat.

No	Nama Dusun	Jarak ke kantor camat (Km ²)
1	Aek Botik	2.00
2	Sirihit-rihit	3.00
-	Jumlah	5.00

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak antar Desa Setia dengan Kecamatan Pahae Jae tidak begitu jauh dan inilah salah satu kemudahan bagi setiap kepala desa untuk berinteraksi dengan Camat Kecamatan Pahae Jae. Demikian pula adanya kemudahan bagi Kepala Desa untuk memantau segala aktifitas warga dari setiap Dusun.

J. Pemukiman

Dalam hal pola pemukiman Desa Setia, bangunan fisik rumah penduduk Desa Setia ini (kurang lebih 65 persen) sudah permanen, yaitu dinding rumahnya terbuat dari tembok, lantainya sudah disemen/keramik dengan atap rumah dari

⁹¹*Ibid*, 2014, h. 8.

seng. Rumah ini biasanya dimiliki oleh orang yang keluarganya memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pedagang. Namun juga ada rumah penduduk Desa Setia (kurang lebih 35 persen) masih semi permanen yaitu rumah yang terbuat dari semen dan kayu dengan atap seng.

C. Letak Demografis

Sebagai desa yang terletak di tengah Kecamatan Pahae Jae. Desa Setia termasuk Desa yang memiliki jumlah penduduk yang tidak tergolong padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 2 April 2014, penduduk Desa Setia berjumlah 1134 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di dusun Aek Botik yakni sebanyak 618 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di dusun Sirihit-rihit yakni sebanyak 516 jiwa.

Secara umum penduduk Desa Setia terdiri dari berbagai macam suku dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Toba. Di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Batak Tapsel, Melayu, dan Sunda. Pada umumnya masyarakat Desa Setia dihuni oleh masyarakat tetap suku Batak Toba. Dan suku-suku selain Batak Toba yang berada di desa ini adalah pendatang yang kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Desa Setia. Sementara keberadaan suku Batak Toba merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah masyarakat dapat dirincikan pada 2 dusun, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 5⁹²**Jumlah Penduduk dan Luas Desa Per Km dirinci menurut Dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Aek Botik	618	13.50
2	Sirihit-rihit	516	10.50
-	Jumlah	1134	24.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati jumlah terbesar adalah dusun Aek Botik dan yang terkecil adalah dusun Sirihit-rihit.

Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Desa Setia dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6⁹³**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Menurut Dusun**

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Aek Botik	296	332	618
2	Sirihit-Rihit	234	272	516
-	Jumlah	530	604	1134

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Setia yang berjenis kelamin perempuan dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tidak jauh beda dengan persentase 55% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Setia. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 45% dari jumlah penduduk.

⁹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Taput, tahun 2014, h. 10.

⁹³*Ibid.*, h. 12.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Setia termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana sarjana satu (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2). (Bahkan bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, Mantan Dekan FIP UNIMED dua Periode 2004-2011 adalah asli putra daerah Desa Setia Sirihit-rihit). Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Desa Setia berdasarkan uraian tabel berikut ini.

Tabel 8⁹⁴**Jumlah Sekolah Dasar**

No	Nama Dusun	Negeri	Jumlah
1	Aek Botik	-	-
2	Sirihit-rihit	2	2
-	Jumlah	2	2

Tabel 9⁹⁵
Jumlah SLTP dan SLTA
dirinci menurut status sekolah

No	Nama Dusun	MTs Swasta	SLTA	Jumlah
1	Aek Botik	1	-	1
2	Sirihit-rihit	-	-	-
-	Jumlah	1	-	1

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Desa Setia ini adalah Sekolah Dasar Negeri. Dan Madrasah Tsanawiyah adalah Swasta. Namun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tidak ada. Walaupun demikian desa ini sudah termasuk desa yang maju dibandingkan dengan desa-desa yang ada disekitarnya, yang sama sekali tidak ada sekolah. Dari sini dapat diketahui bahwa minat masyarakat Desa Setia terhadap pendidikan anak-anak mereka dianggap cukup apresiasi.

E. Agama

Dari segi agama masyarakat Desa Setia tergolong masyarakat yang majemuk. Agama yang dianut oleh penduduk Desa Setia ini adalah agama Islam dan agama Kristen Protestan. Namun Agama Islam memiliki kapasitas jumlah

⁹⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014, h. 21.

⁹⁵*Ibid*, h. 22.

umat yang terbesar di Desa Setia ini.⁹⁶ Jumlah penganut agama Islam di Desa Setia 96 % sedangkan penganut agama Kristen hanya 4 %. Tingkat ketaatan penduduk Muslim Desa Setia ini tergolong orang-orang yang taat beragama. Terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang shalat berjamaah di tiga waktu yaitu waktu shalat Maghrib, Isya dan Subuh. Namun waktu shalat Zhuhur dan Ashar, penduduk ini tidak begitu aktif menjalankannya dengan berjama'ah. Ini karena waktu siang mereka bekerja ditempat yang berbeda dan tidak memungkinkan mereka untuk shalat berjama'ah di dua waktu ini. Dan Selain itu, para ibu-ibu di Desa Setia ini aktif melaksanakan “wirit yasinan” yang diadakan sekali seminggu di hari jum,at. Pengetahuan mereka tentang agama Islam, tidak merata bagi setiap orang. Hanya sebagian orang yang paham tentang agama Islam. Dapat diketahui dari masih banyak yang shalat yang tidak mengetahui syarat dan rukun shalat.⁹⁷ Pandangan masyarakat Desa Setia tentang hukum Islam sangat baik namun masalah melanggar aturan hukum adat tentang larangan pernikahan, mereka tidak berani untuk melakukan terobosan malangkahnya. Pandangan masyarakat ini tentang hukum adat, sangat respon dan sangat *respect*. Sehingga masyarakat ini sangat kesulitan untuk menyelaraskan aturan adat dengan aturan hukum agama (Islam). Dan di desa Setia ini ada rumah-rumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing–masing Dusun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁹⁶Wawancara langsung pada tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 2 April 2014 dengan bapak Ramlan Siregar selaku Kepala Desa Setia. Persentase jumlah masyarakat muslim dengan kristen, muslim 96% sedangkan agama kristen hanya 4 % saja.

⁹⁷Wawancara langsung pada tanggal 15 Agustus 2013 di Masjid Taqwa Sirihit-rihit dengan beberapa orang warga Desa Setia.

Tabel 12⁹⁸
Jumlah rumah ibadah di Desa Setia

No	Nama Dusun	Masjid	Mushola/Surau	Gereja	Jumlah
1	Aek Botik	1	1	-	2
2	Sirihit-rihit	2	1		3
	Jumlah	3	2		5

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada 5 unit sarana peribadatan bagi umat Islam di Desa Setia ini, sedangkan bagi masyarakat yang beragama Kristen sarana peribadatannya berupa gereja tidak terdapat di Desa ini. Namun hal tersebut bukan berarti mereka tidak dapat melakukan ibadah atau kegiatan keagamaannya dengan leluasa, mereka dapat melakukannya di rumah tempat tinggal mereka atau bahkan mereka dapat melakukan peribadatan ke desa lainnya.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa Desa Setia hanya memiliki rumah ibadah untuk muslim saja.⁹⁹ Suasana yang *kondusif* antar umat beragama menjadi *trend* masyarakat di Desa Setia ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali.¹⁰⁰ Masyarakat Desa Setia sangat kuat dalam toleransi antar umat beragama. Kegiatan gotong - royong kepada pemeluk agama ada di setiap dusun yang menjadi rutinitas tahunan bersama. Seperti membersihkan kuburan setiap menjelang Ramadan.¹⁰¹

⁹⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2014, h. 36.

⁹⁹ Renovasi, pelebaran dan renovasi kerap kali dilakukan masyarakat muslim yang ada di Desa Setia. Peneliti mengamati ini berulang-ulang setiap melewati daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian ini.

¹⁰⁰ Terhitung selama 29 tahun sampai sekarang Peneliti masih terhitung warga Desa Setia, akan tetapi tidak pernah ada konflik antar agama yang mengarah pada tindakan anarkis. (Peneliti adalah putra daerah Desa Setia)

¹⁰¹ Kegiatan ini masih rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

F. Mata Pencarian Pola Masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Setia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bertani dan wirausaha (bardagang). Namun selain bertani dan berdagang, masyarakat Desa Setia ada juga yang memiliki mata pencarian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, POLRI, TNI dan lain-lain yang kesemua bentuk usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 13¹⁰²

Banyaknya Penduduk menurut Mata Pencarian di Desa Setia

No	Dusun	Petani	PNS	ABRI	POLISI	Karyawan Swasta
1	Aek Botik	120	12	7	2	43
2	Sirihit-rihit	55	8	-	-	28
3	Jumlah	175	20	7	2	71

G. Tahapan Adat Pernikahan Batak Toba

Adapun tahapan adat pernikahan Batak Toba Desa Setia yaitu :¹⁰³

1. *Marhori-hori Dinding*.

“*Marhori-hori dinding*” merupakan tahapan pendekatan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Untuk memberitahukan rencana mempersunting anak perempuannya. Pendekatan ini hanya dilakukan oleh kedua orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki. Biasanya pihak laki-laki mengutus

¹⁰² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, h. 16-18.

¹⁰³ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutasuht, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan urutannya sesuai juga dengan isi buku J.C. Verouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Yayasan Adikarya Ikapi-The ford Foundation 1986),h.209-275.

satu atau dua orang ke rumah pihak perempuan, sekaligus memberitahukan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Bila disetujui, maka dapat dilanjutkan ketahap *marhusip*.

2. "*Marhusip*".

Pada tahap ini telah melibatkan beberapa sanak keluarga. Biasanya pihak perempuan memanggil saudara laki-lakinya pada acara "*Marhusip*" tersebut, begitu juga dengan pihak laki-laki. Di sini dibicarakan mengenai rencana pernikahan serta pemberitahuan mahar, tanggal pernikahan, tempat atau gedung pernikahan serta apa yang akan dipersiapkan pada saat pelaksanaan adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan sebaliknya. Bila kedua pihak setuju maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu *marhata sinamot*.

3. *Marhata Sinamot*

Marhata sinamot biasanya diadakan selesai membagikan *jambar*. *Marhata sinamot* yaitu membicarakan berapa jumlah *sinamot* dari pihak laki-laki, hewan apa yang di sembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan dan di mana dilakukan upacara perkawinan tersebut. Acara *marhata sinamot* dapat juga dianggap sebagai pengenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Mas kawin yang diberikan pihak laki-laki biasanya berupa uang yang jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat terjadinya tawar-menawar.

4. *Martonggo Raja*

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba bukan hanya urusan ayah dan ibu kedua calon pengantin, tetapi merupakan urusan semua keluarga, karena itu orang tua calon pengantin akan mengumpulkan semua anggota keluarga di rumah mereka masing-masing dan yang hadir dalam upacara ini terutama menyangkut

dalihan na tolu yaitu *hula-hula*, *boru*, *dongan sabutuha*, dan *dongan sahuta* (teman sekampung).

7. Marunjuk

Marunjuk adalah saat berlangsungnya upacara pernikahan, upacara pernikahan pada masyarakat Batak Toba ada dua macam yaitu *alap* dan *taruhon jual*. *Alap jual* adalah suatu upacara adat pernikahan Batak Toba yang tempat upacara pernikahan dilaksanakan di tempat atau di kampung mempelai wanita. Pengantin perempuan dijemput oleh pengantin laki-laki bersama orang tua, kaum kerabat dan para undangan ke rumah orang tuanya. Pihak pengantin laki-laki sering menyebut istilah ini *mangalap boru* (menjemput pengantin perempuan). Pada acara merunjuk inilah akan berjalan semua upacara perkawinan dari makan *sibuhai-buhai*, pembagian, dan *mangulosi*.

I. Acara Pesta Pernikahan Adat Batak Toba

1. Marsibuha-Buhai

"*Marsibuha-buhai*" merupakan acara permulaan dalam memulai Pernikahan Adat Batak Toba. Maksud dari "*marsibuha-buhai*" adalah datangnya pihak keluarga laki-laki ke rumah pihak wanita untuk menjemput pengantin wanita dengan membawa "*Tudu-tudu Sipanganon*". Setibanya pihak laki-laki di rumah pihak perempuan, *Raja Parhata* pihak perempuan mengabarkan kepada dongan tubunya dan keluarga lainnya bahwa pihak laki-laki telah tiba dan akan memasuki rumah (maksudnya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan pihak laki-laki). Kemudian *Raja Parhata* pihak perempuan mempersilahkan masuk ke rumah dan saat itu pengantin perempuan menyematkan bunga kepada pengantin laki-laki. Selanjutnya pihak laki-laki memberikan "*Tudu-tudu*

Sipanganon" kepada pihak perempuan setelah selesai maka pihak perempuan memberikan "*Dengke/ikan*" kepada pihak laki-laki. Kemudian makan bersama dan berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberkati rencana Pesta Pernikahan tersebut. (Setelah selesai acara makan, maka kedua pihak keluarga berangkat sama ke Gereja untuk melaksanakan "Pamasu-masuon Parbagason" putra-putri mereka Bagi yang beragama non muslim). Namun bagi yang beragama Islam, adakalanya melaksanakan pemberkatan di masjid atau di rumah.

- *Raja Parhata* / Protokol Pihak Laki-laki = PRP
- *Raja parhata* / Protokol Pihak Perempaun = PRW
- *Suhut* Pihak Laki-laki = SP
- *Suhut* Pihak Perempuan = SW

2. Acara Adat Na Gok (Ulaon Sadari)

a). Prosesi Memasuki Tempat Acara Adat

- PRW meminta semua dongan tubu / semarganya bersiap-siap untuk menyambut dan menerima kedatangan rombongan hula-hula dan tulang.
- PRW memberitahukan kepada hula-hula, bahwa SP sudah siap menyambut dan menerima kedatangan hula-hula.
- Setelah hula-hula mengatakan mereka sudah siap untuk masuk, PRW mempersilahkan masuk dengan menyebut satu persatu, hula dan tulangnya secara berurutan.

Urutan *uduran* (rombongan)

1. *Hula-Hula*

2. *Tulang*

3. *Bona Tulang*

4. *Tulang Rorobot*

5. *Bona Ni Ari*

6. *Hula-Hula Na Marhaha-Anggi*

7. *Hula-Hula Naposo / Parsiat.*

- Protokol *hula-hula* menyampaikan kepada rombongan hula-hula agar mereka bersama-sama masuk dan menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada hula-hula
- Protokol *hula-hula* menyampaikan kepada rombongan hula-hula dan tulang yang sudah disebutkan PRW pada point 3 bahwa sudah siap menerima kedatangan rombongan hula-hula dan tulang dengan permintaan agar *uduran hula-hula* dan *tulang* memasuki tempat acara secara bersama-sama. Untuk itu diatur urutan-urutan *uduran* (rombongan) *hula-hula* dan *tulang* yang akan memasuki ruangan. *Uduran* yang pertama adalah *Hula-hula* diikuti *Tulang* sesuai urutan yang disebutkan PRW.
- Menerima kedatangan Suhut Paranak (SP). Setelah seluruh rombongan hula-hula dan tulang dari SW duduk , rombongan PRW memberitahu bahwa tempat untuk SP dan uduruan sudah disediakan dan SW sudah siap menerima kedatangan mereka. beserta Hula-hula, tulang SP dan udurannya.
- PRP menyampaikan kepada dongan Tubu bahwa sudah ada permintaan dari pihak perempuan agar mereka memasuki ruangan.
- PRP memohon sesuai permintaan hula-hula SW agar mereka masuk bersama-sama dengan SP. Untuk itu tata cara dan urutan memasuki ruangan diatur

yaitu pertama adalah rombongan SP dan borunya disusul Hula-hula kemudian Tulang dan seterusnya.

b). Menyerahkan Tanda Makanan (*Tudu-Tudu Ni Sipanganon*)

Setelah pada tahap di atas maka dilanjutkan acara penyerahan "*Tudu-tudu Ni Sipanganon*" dan disini *Raja Parhata* pihak laki-laki memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa mereka akan menyerahkan "*Tudu-tudu Ni Sipanganon*" dan disambut oleh *Raja Parhata* pihak perempuan untuk memberitahukan kepada pihak perempuan untuk mempersiapkan diri menerima "*Tudu-tudu Ni Sipanganon*" dari pihak laki-laki. Tanda makanan adat yang pokok adalah : kepala utuh, leher (*tanggalan*), rusuk melingkar (*somba-somba*), pangkal paha (*soit*), punggung dengan ekor (*upasira*), hati dan jantung ditempatkan dalam baskom/ember besar dan disampaikan dengan bahasa adat (*umpasa*) yang intinya menunjukkan kerendahan hati dengan mengatakan walaupun makanan yang dibawa itu sedikit semoga makanan tersebut membawa manfaat dan berkat jasmani dan rohani *hula-hula* SW dan semua yang memakannya . Dan penyerahan tersebut dipakai *umpasa* yaitu :

"Sitiktikma si gompā, golang-golang pangarahutna. tung songoni na hupatupa hami, sai godang ma pinasuna". kemudian disambut dengan bersama-sama mengatakan : "*Hematutu*".

c). Menyerahkan “Dengke” (Ikan Mas) Oleh *Suhut*/ Pihak Perempuan

Setelah selesai pihak laki-laki menyerahkan "*tudu-tudu Ni Sipanganon*" maka pihak perempuan membalas dengan memberikan "Dengke" kepada pihak lakilaki. Tata cara penyerahannya sama dengan penyerahan di atas. (Aslinya ikan yang diberikan adalah jenis "*Ihan*" atau "Ikan Batak". Sejenis ikan yang hidup di

Danau Toba dan sungai Asahan bagian hulu dan rasanya memang manis dan khas. Ikan ini mempunyai sifat hidup di *ari* (hari) yang jernih (*tio*) dan kalau berenang / berjalan selalu beriringan (mudur-mudur), karena itu disebut : dengke sitio-tio, dengke simudurmudur. Simbol inilah yang menjadi harapan kepada pengantin dan keluarganya yaitu seia sekata, beriringan dan murah rejeki (*tio pancarian dohot pangomoan*). Tetapi sekarang ikan sudah sulit didapat dan jenis ikan mas sudah biasa digunakan sebagai penggantinya. Ikan mas ini dimasak khas Batak yang disebut "*Naniarsik*" yaitu ikan yang dimasak (direbus) dengan bumbu tertentu sampai airnya berkurang pada kadar tertentu dan bumbunya sudah meresap ke dalam tubuh ikan tersebut.

d). Makan Bersama

Setelah kedua pihak saling memberi dan menerima seperti di atas, maka acara selanjutnya adalah makan bersama dan biasanya sebelum makan terlebih dahulu berdoa yang dipimpin dari pihak paranak karena makanan yang dibawa dari pihak laki-laki walaupun acaranya di tempat pihak perempuan. Sebagai bahasa pengantar makan, *Raja Parhata* dari pihak laki-laki mengatakan :
 “*Dihamu Amanta Raja dohot hamu Inang Soripada songon hata natua-tua mandok: Sititikma si gompas, golang-golang pangarahutna, tung songoni na hupatupa hami, sai godang ma pinasuna*”.

e). Membagi Jambar / Tanda Makanan Adat

Kata "*Jambar*" dapat diartikan pembagian dari tingkatan masing-masing dari adat batak. Biasanya pembagian "*Jambar*" sudah diberitahukan pada saat acara "*Marpudun Saut* atau *Martumpol*" pada bagian-bagian mana yang akan

diberikan kepada masing-masing pihak keluarga. Di sini pihak perempuan memberikan bagian *jambar* untuk pihak paranak sebagai *ulu ni dengke mulak*. Selanjutnya masing-masing *suhut* membagikannya kepada masing-masing fungsi dari pihak keluarganya.

f). *Manjalo Tumpak* (Tanda Kasih Melalui Sumbangan)

Arti harfiah *tumpak* adalah sumbangan bentuk uang, tetapi melihat keberadaan masing-masing dalam acara adat mungkin istilah yang lebih tepat adalah tanda kasih. Yang memberikan *tumpak* adalah undangan *Suhut* Laki-laki yang diantarkan ke tempat *Suhut* duduk dengan memasukkannya ke dalam baskom yang telah disediakan di hadapan *suhut* sambil menyalami keluarga pihak laki-laki.

g). Acara Sambung Kata.

Disini penulis pakai istilah sambung kata karena kedua pihak akan saling menyampaikan maksudnya sesuai dengan urutan acara adat yaitu dimulai dengan "*Pinggan Panungkunan*". *Pinggan Panungkunan* adalah piring yang didalamnya ada beras, sirih, sepotong daging (*tanggo-tanggo*) dan uang 4 lembar, piring dengan isinya ini adalah simbol untuk memulai percakapan adat.

- PRP meminta seorang dari keluarga *borunya* mengantar *Pinggan Panungkunan* kepada PRW.
- PRW menyampaikan telah menerima *Pinggan Panungkunan* dengan menjelaskan arti semua isi yang ada dalam beras tersebut. Kemudian PRW mengambil 3 lembar uang itu dan kemudian meminta salah seorang *borunya* untuk mengantar piring tersebut kembali kepada PRP.

- PRW membuka percakapan dengan memulai penjelasan makna dari tiap isi pinggan panungkunan (beras, sirih, daging dan uang), kemudian menanyakan kepada pihak paranak makna tanda dan makanan adat yang sudah dibawa dan dihidangkan oleh pihak paranak.
- Akhir dari pembukaan percakapan ini, keluarga paranak mengatakan bahwa makanan dan minuman pertanda ucapan syukur karena semua dalam keadaan sehat dan tujuan pihak paranak adalah menyerahkan kekurangan mahar (*Sinamot*) dilanjutkan adat yang terkait dengan pernikahan anak mereka.

Dalam percakapan selanjutnya, setelah PRW meminta PRP menguraikan apa / berapa yang mau mereka serahkan, PRP memberitahukan kekurangan *sinamot* yang akan mereka serahkan adalah sebesar Rp.3 juta menggenapi seluruh *sinamot* Rp 10 juta.(jumlah uang ini hanya contoh).

(Pada waktu acara *Marpudun Saut*, pihak paranak sudah menyerahkan sebagian *sinamot* sebagai "*Bohi Sinamot*" (mendahulukan sebagian penyerahan *sinamot* di acara *adat na gok*).

Sebelum PR menyetujui , lebih dahulu RP meminta nasehat dari Hulahulanya dan pendapat dari keluarga borunya.

Sesudah disetujui PR, selanjutnya penyerahan kekurangan *sinamot* kepada *suhut parboru* oleh paranak.

h). Penyerahan *Panandaion*

Tujuan dari adat berupa *Panandaion* adalah untuk memperkenalkan keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan ini biasanya dilakukan dengan menyerahkan berupa uang. *Panandaion* ini diberikan kepada 4 bagian

yang disebut dengan *patodoan* atau "*Suhi Ampang Na Opat*" yang merupakan simbol pilar jadinya acara adat itu.

i). Penyerahan *Tintin Marangkup*

Setelah adat berupa *Panandaion*, maka dilanjutkan dengan penyerahan "*Tintin Marangkup*". Penyerahan ini berupa piring yang berisikan uang (bagian dari *sinamot* yang diterima) dan beras yang diserahkan kepada Tulang Paranak (saudara laki-laki dari ibu). Yang menyerahkan adalah orang tua pihak perempuan. "Secara tradisi batak adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu kita merupakan calon pasangan hidup dari anak laki-lakinya). "*Tintin Marangkup* ini merupakan simbol bahwa anak perempuan dari pihak perempuan merupakan anak perempuannya (*boru*) juga yaitu *Tulang Paranak* walaupun *borunya* bukan dari marga *Tulang Paranak*.

j). Pemberian *Ulos* oleh Pihak Perempuan

Dalam adat Batak Toba tradisi lama atau religi lama, *ulos* merupakan sarana penting bagi *hula-hula* untuk menyatakan atau menyalurkan *sahala* atau berkatnya kepada *borunya* di samping ikan, beras dan kata-kata berkat. Pada waktu pembuatannya, *ulos* dianggap sudah mempunyai "kuasa". Karena itu, pemberian *ulos* baik yang memberi maupun yang menerimanya tidak sembarang orang, harus mempunyai alur tertentu antara lain *hula-hula* kepada *borunya*, orang tua kepada anak-anaknya. Dengan pemahaman iman yang dianut sekarang, *ulos* tidak mempunyai nilai magis lagi sehingga *ulos* sebagai simbol dalam pelaksanaan acara adat. Ujung dari *ulos* selalu banyak rambutnya sehingga

disebut "*ulos siganjang/sigodang rambu*" (rambu, benang diujung *ulos* yang dibiarkan terurai). Pemberian *Ulos* sesuai dengan maknanya :

- 1). *Ulos Pansamot* diberikan oleh orang tua pengantin wanita kepada orang tua pengantin pria.
- 2). *Ulos Hela* diberikan orangtua pengantin wanita kepada pengantian pria.
- 3). *Ulos "Suhi Ampang Na Opat"*:
 - a. *Pamarai* (Kakak / Adik dari Ayah pihak laki-laki).
 - b. *Simanggokhon* (kakak / adik pengantin pria).
 - c. *Namborunya* (saudara perempuan dari ayah pengantin pria).
 - d. *Sihunti Ampang* (kakak / adik perempuan dari pengantin pria).
- 4). *Ulos "Holong"* diberikan kepada pengantin dari keluarga *Parboru / Partodoan* :
 - a. *Pamarai* (kakak / adik dari ayah pengantin wanita)
 - b. *Simandokkon* (kakak / adik laki-laki dari pengantin wanita)
 - c. *Namboru (Iboto* / saudara perempuan dari ayah pengantin wanita
 - d. *Pariban* (kakak dari pengantin wanita)
- 5). *Ulos dari Hula-hula / Tulang parboru* :
 - a. *Hula-hula* (saudara laki-laki dari ibu pengantin wanita)
 - b. *Tulang* (paman / sepupu (lae) dari ayah pengantin wanita)
 - c. *Bona Tulang* (paman / sepupu (lae) dari ayah pengantin wanita)
 - d. *Tulang Rorobot* (paman dari ibu pengantin wanita)
- 6). *Ulos dari Hula-hula / Tulang paranak* (sama seperti nomor 5 dari pengantin pria)

k). Mangunjungi Ulaon

- 1). *Manggabei* (kata-kata doa dan restu) dari pihak parboru berupa kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya acara adat dengan baik dan ucapan terima kasih kepada *dongan tubu* dan *hula-hula*.
- 2). *Mangampu* (ucapan terima kasih) dari pihak paranak kepada semua pihak atas terlaksananya acara adat dengan baik.
- 3). *Mangolophon* (*mengaminkan*) oleh *tetuah* / yang dituakan di kampung itu. Kedua *suhut* menyediakan piring yang berisikan beras dan uang kemudian diserahkan kepada *Raja Huta* yang mau *mangolophon*. Raja Huta berdiri sambil mengangkat piring tersebut dan menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena acara adat terlaksana dengan baik dan mengucapkan :
 - *olop,olop,olop* sambil menabur beras ke atas dan kemudian membagikan uang tersebut.
- 4). Dan akhirnya acara tersebut ditutup dengan Doa dan diakhiri sama-sama mengucapkan : *Horas,Horas,Horas*.

8. Paulak Une

Acara ini dimasukkan sebagai langkah agar kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang setelah upacara perkawinan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara perkawinan, pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya, bersama pengantin pergi ke rumah pihak orang tua pihak pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa anak perempuannya betah tinggal di rumah mertuanya.

9. *Maningkir Tangga*

Upacara ini pihak perempuan pergi mengunjungi pengantin di rumah pihak laki-laki, di mana mereka makan bersama melakukann pembagian jambar. Pada hakekatnya maningkir tangga ini dimaksudkan agar pihak perempuan secara langsung melihat dari keadaan putrinya dan suaminya karena bagaimanapun mereka telah terikat oleh hubungan kekeluargaan dan sekaligus memberi nasehat dan bimbingan kepada pengantin dalam membina rumah tangga.

Kesepakatan pada nilai-nilai sosial merupakan dasar yang penting bagi banyak kelompok, terutama dalam perkawinan. Tiap-tiap pasangan perkawinan mempunyai nilai-nilai budaya sendiri, hal-hal yang dianggap penting oleh masing-masing pihak. Jarang sekali hal ini disepakati secara lengkap. Setiap pasangan dapat berbeda keinginannya dalam menentukan hal-hal seperti pengaturan keuangan, rekreasi, agama, memperlihatkan kasih sayang, hubungan-hubungan dengan menantu mereka, dan tata cara dan prosesi pernikahan adat Batak Toba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Aturan Pernikahan Adat bagi Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia

Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, mempunyai aturan hukum pernikahan adat bagi masyarakatnya, yaitu “larangan pernikahan adat”. Bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan, lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Dalam perkawinan adat Batak Toba bagi masyarakat Desa Setia, ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati. Dan apabila aturan tersebut dilanggar/diabaikan, maka akan memunculkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang muncul diatur sangat jelas dan tegas. Dan ini telah dianut oleh masyarakat Batak Toba Desa Setia, sejak dahulu sampai sekarang. Aturan hukum yang dilanggar, dilaksanakan oleh penatua. Adapun bentuk hukumannya seperti dibuang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga dan pernikahannya dinyatakan batal (dibatalkan).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutasuhut, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan “*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*” (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 206-209. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197-209.

B. Faktor-faktor dan latar belakang sosiologis yang menyebabkan adanya larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba

Adapun faktor-faktor dan latar belakang sosiologis yang menyebabkan adanya larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba adalah sebagai berikut:

1. Faktor *Namarpandan*

Namarpadan/ padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang *padan* marga. (Lihat marga-marga yang sudah disebutkan dipembahasan awal).¹⁰⁵

Latar belakang sosiologisnya:

Semua marga-marga yang sudah ditentukan (lihat pembahasan sebelumnya) tidak dibenarkan untuk menikah. Karena dalam kepercayaan oleh orang terdahulu yang mengadakan perjanjian tersebut bahwa orang yang menikah dengan marga-marga yang sudah ditentukan di atas, akan mendatangkan murka roh para leluhur. Murka roh para leluhur tersebut tidak hanya akan merugikan kedua belah pihak (marga yang sudah ditentukan), akan tetapi juga akan membawa kerugian kepada kelompok masyarakat tempat mereka tinggal/berdomisili. Itulah sebabnya mereka dilarang untuk saling menikah agar penduduk dan orang yang ditentukan di atas tidak kena imbas dari murka para leluhurnya. Untuk megantisifasi datangnya murka para leluhur, makanya marga tersebut dilarang untuk saling menikah. Dan termasuk murka yang akan dialami oleh para warga setempat adanya bala berupa hama tanaman yang akan

¹⁰⁵ *Ibid.*

mengakibatkan tanam-tanaman rusak atau padi akan mengalami gagal panen. Kejadian ini dulu pernah terjadi di Samosir bagian utara.¹⁰⁶ (Dan karena kejadian ini pernah dialami oleh daerah yang dulunya Samosir utara adalah termasuk pusat marga Batak Toba, secara tidak langsung warga Samosir utara akan bercerita ke desa atau daerah lain tentang kejadian tersebut. dan kabar burung menyebar ke segala penjuru daerah Batak Toba. Sejak saat itu mulai dipercayai oleh suku Batak Toba apabila orang yang sudah ditentukan di atas melanggar larangan adat tersebut akan mendatangkan murka para leluhur. Dan kepercayaan itu masih tetap dipelihara oleh generasi suku Batak Toba Desa Setia).¹⁰⁷

Marga-marga tersebut di atas tidak dibenarkan menikah oleh hukum adat Batak Toba, karena tidak bolehnya bersatu dalam rumah tangga, tidak boleh satu mobil, tidak boleh satu perahu/kapal, tidak boleh satu pesawat. Karena apabila mereka disatukan roh para leluhur akan marah/murka dan akan membawa bahaya. Bahaya yang muncul tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, perahu/kapal akan tenggelam, pesawat akan mengalami bahaya. (Bapak Saut Pakpahan mengilustrasikan seperti contoh berikut: Marga *Simanjuntak Parhorbo Jolo* dengan *Simanjuntak Parhorbo Pudi*¹⁰⁸ tidak dibenarkan bersatu dalam rumah dalam rumah tangga, tidak boleh satu mobil, tidak boleh satu perahu/kapal, tidak boleh satu pesawat. Bahaya yang muncul tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, perahu/kapal akan tenggelam, pesawat akan mengalami bahaya).

¹⁰⁶ Wawancara di rumah tokoh adat tanggal 16 Agustus 2013 bersama bapak Saut Pakpahan.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Simanjuntak Parhorbo Jolo artinya Simanjuntak yang mengurus bagian depan. Dan Simanjuntak Parhorbo Pudi artinya Simanjuntak yang mengurus bagian belakang.

Penyebab awal tidak dibenarkan bersatunya Marga *Simanjuntak Parhorbo Jolo* dengan *Simanjuntak Parhorbo Pudi* adalah sebagai berikut: dikisahkan bahwa zaman dahulu, kedua marga ini adalah saudara kandung yang memiliki satu ekor kerbau betina. Untuk mengurus kelangsungan hidup kerbau tersebut mereka sepakat untuk bagi tugas. *Parhorbo jolo* mengurus bagian depan kerbau tersebut, seperti memberi makanan dan minum yang cukup dan dialah yang punya hak untuk bagian depan kerbau tersebut. Sedangkan saudaranya yang *Parhorbo Pudi* tersebut mengurus bagian belakang dari kerbau tersebut, seperti membersihkan kotoran kerbau yang keluar dari belakang kerbau tersebut dan dialah yang punya hak mutlak untuk bagian belakang kerbau tersebut. Mereka punya masing masing hak yang walaupun nanti kerbau tersebut dipotong, bagian dari masing-masing mereka sudah pasti.

Namun karena kerbau tersebut adalah seekor kerbau betina yang mungkin saja akan dapat melahirkan (bisa jadi ada pejantannya milik orang lain), pada suatu ketika, kerbau ini melahirkan seekor anak kerbau. Dan *Simanjuntak Parhorbo Pudi*/yang mengurus bagian belakang dan yang punya hak bagian belakang, dia merasa anak kerbau yang lahir dari bagian belakang, dan dia merasa bahwa dialah pemilik hak mutlak, dan kerennanya dia tidak mau membagi kerbau tersebut. mereka berdua ribut dan tidak dapat disatukan. Dan mereka sepakat dan keturunannyapun nanti tidak akan bersatu dalam segala kegiatan. Dan semenjak kejadian tersebut, apabila ada keturunan dari kedua marga tersebut berada dalam satu mobil, mobil itu akan kecelakaan, berada dalam satu perahu, perahu tersebut akan tenggelam. Setelah kejadian tersebut dari dulu sampai sekarang dipercaya oleh orang Batak Toba Desa Setia, roh para leluhur mereka murka apabila kedua

marga ini bersatu dalam satu tempat (yang dilarang). Karena apabila disatukan akan membawa bahaya, bukan saja bahayanya kepada kedua marga tersebut tetapi pada orang yang ikut bersama mereka juga ikut bahaya. Seperti kecelakaan bus, penumpang lain juga akan ikut bahaya. Dan biasanya dipercaya oleh masyarakat Desa Setia penyebab kecelakaannya apabila setelah kejadian (bahaya) diketahui kedua marga tersebut berada dalam suatu tempat yang dilarang.¹⁰⁹

Menurut bapak Saut Pakpahan, marga-marga yang ada dalam kategori di atas, juga hampir sama halnya, dengan cerita di atas. Walaupun mungkin dengan cerita dan redaksi yang berbeda tapi ada kemungkinan karena suatu kisah yang mungkin pada dasarnya ada kejadian yang pernah dialami oleh marga-marga tersebut yang melarang mereka untuk bersatu. Inilah kemungkinan sebab para tokoh adat melarang mereka untuk dipersatukan dalam pernikahan.¹¹⁰

Mayarakat Desa Setia tetap setia dan patuh terhadap aturan yang dibuat dan yang ditentukan oleh para orang-orang terdahulunya. Mereka sulit untuk meninggalkan aturan hukum adat, karena aturan hukum adat itu sudah tertanam kuat dalam hati setiap orang Batak Toba khususnya yang masih tinggal di Desa Setia.

2. Faktor *Namarito*

Namarito (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Kumpulan PARNA (*Pomparan ni Raja Naiambaton*/anak dan keturunan *Raja Naiambaton*)

¹⁰⁹ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan.

¹¹⁰ *Ibid.,*

juga dinyatakan sebagai *namarito*/saling bersaudara. (Lihat kelompok PARNA dalam pembahasan sebelumnya).

Perkawinan dalam aturan Adat Batak Toba adalah bersifat *eksogami*, yaitu perkawinan di luar kelompok marga. Menurut aturan adat suku Batak Toba yang laki-laki dilarang mengambil istri dari kalangan kelompok agnata sendiri, sedangkan perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami”.¹¹¹ Adapun termasuk tujuan dari sifat eksogami dalam tradisi adat Batak Toba, adalah untuk memperbesar/ memperluas dan memperkuat marga tersebut sehingga menunjukkan kesan, banyak saudara adalah bagian dari sebuah simbol kesejahteraan hidup masyarakat Batak Toba.

Menurut kepercayaan masyarakat suku Batak Toba dari dahulu sampai sekarang, bahwa semarga pada mulanya adalah satu garis keturunan dari satu ayah. Dan dipahami oleh suku Batak Toba bahwa orang yang berasal dari satu garis keturunan dari satu ayah adalah saudara. Orang yang bersaudara tidak dibenarkan saling menikah, karena dianggap suatu tindakan *incest*. Sedangkan tindakan *incest* dalam pandangan adat masyarakat Batak Toba sangatlah dilarang. Dan anak yang lahir dari hasil perkawinan *incest* semarga dianggap sebagai anak haram yang menimbulkan aib dalam suatu keluarga, aib dalam suatu kampung, aib dalam satu daerah, dan bahkan aib bagi semua orang suku Batak Toba.¹¹²

¹¹¹Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutasuht, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan “*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*” (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 99-109. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197.

¹¹² Wawancara dengan di rumah bapak Hasaruddin Batubara Batubara selaku tokoh adat sekaligus tokoh agama (Islam) pada tanggal 20 Agustus 2013.

Sedangkan marga yang tergolong dari kelompok PARNA di atas adalah anak dari *Raja Naiambaton*. Mereka berasal dari satu keturunan juga, yaitu dari satu ayah (*Raja Naiambaton*). Kerena mereka berasal dari satu ayah (*Raja Naiambaton*), dalam artian bahwa marga-marga yang tergolong dalam PARNA tersebut adalah bersaudara (kandung). Menurut kepercayaan Batak Toba bahwa orang yang bersaudara dilarang menikah satu sama lain.

Dalam tradisi adab Batak Toba, *nasmarito*/ atau marga yang dinyatakan sama dan PARNA sangat dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Dipercaya, apabila melangsungkan pernikahan akan membawa murka para leluhur. Murka tersebut adakalanya datang kepada orang yang melanggar larangan perkawinan adat, dan adakalanya murka itu datang kepada warga setempat. Murka itu biasanya berbentuk bala ditandai dengan di malam hari anjing selalu mengaum dan akan mengakibatkan gagal panen (padi) tanaman yang ada dalam daerah tersebut. karena Itulah sebabnya orang yang melangsungkan pernikahan *namarito*/semarga dan ini di usir dari kampung. Karena akan membawa sial bagi warga kampung setempat. Dan dahulu di Toba Samosir (Daerah asal Batak Toba) sanksi pelanggaran pernikahan semarga di bakar hidup-hidup, gunanya untuk membakar bala tersebut biar balanya hangus dan tidak menyebar kepada warga lain. Dan kalau hukumannya dimasukkan ke dalam air sampai mati, agar bala yang di kampung tersebut hanyut terbawa arus air. Dan apabila hukumannya dipasung, gunanya agar balanya itu tertahan/tidak menyebar hanya bertahan di tempat orang yang dipasung tersebut. Maka untuk megantisifasi terjadinya bala kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak warga, dibuat larangan yang

mempunyai sanksi berat terhadap pelanggarnya. Inilah yang sebab dilarangnya orang Batak Toba menikah dengan semarga dan marga-marga (PARNA) yang sudah ditentukan di atas. (Namun hukuman di atas belum pernah terjadi di Desa Setia. Tapi hukuman pengusiran dan pencegahan perkawinan karena faktor-faktor yang sudah ditentukan dalam pembahasan sebelumnya pernah terjadi di Desa Setia). Karena masyarakat Desa Setia masih tetap percaya dan tetap setia dengan aturan hukum adat yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulunya. Dan sampai sekarang masyarakat Desa Setia ini masih tetap percaya dengan murka para leluhurnya akan muncul apabila melakukan tindakan larangan pernikahan adat Batak Toba.

Aturan hukum Adat Batak Toba menganggap bahwa perkawinan dengan saudara semarga (*namarito*) dan kelompok keluarga marga PARNA merupakan perkawinan yang disamakan dengan perkawinan saudara sendiri. Sedangkan perkawinan dengan saudara sendiri dianggap sebagai *inces*. Kalau hukum adat Batak Toba menganggap bahwa ini adalah sebagai *inces*, maka akan menimbulkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Adapun dampak negatif dari pernikahan *inces* adalah sebagai berikut:

1. Sanksi / dampak sosial terhadap pelaku perkawinan semarga

Adapun dampak perkawinan semarga bagi pelaku sebagai berikut:

Marusuf Gultom bersama istrinya D. Boru Gultom:¹¹³

¹¹³ Wawancara di depan Masjid Al-Iman Merendal pada tanggal 23 Maret 2014 bersama pelaku pernikahan semarga bapak Marusuf Gultom dan istrinya D. Boru Gultom. Mereka adalah pelaku pernikahan semarga yang harus meninggalkan Desa Setia sekitar tahun 1942. Setelah meninggalkan Desa Setia, Mereka pindah dan berdomisili di daerah Pijor Koling Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Dan peneliti bertemu dengan pelaku pernikahan semarga di Medan. (Korban tersebut meminta alamatnya yang sekarang untuk dirahasiakan. Dan sekarang, Anak/Keluarga

Dampak dari pernikahan semarga yang terjadi pada kami(pelaku), kami dianggap sebagai aib bagi keluarga, aib bagi tentangga, aib bagi masyarakat, aib bagi kelompok adat. Dan pihak keluarga kami (pelaku) menganggap bahwa kami telah menghancurkan nama keluarga di mata masyarakat. Dan tindakan kami ini (pernikahan semarga) dianggap bagian dari *inces*, yang akan mengakibatkan kami (pelaku) harus keluar dari Desa Setia dan tidak akan dapat diterima di kelompok masyarakat Batak Toba Desa Setia. Dan bahkan kami (para pelaku perkawinan semarga) akan dikucilkan oleh masyarakat Batak Toba di manapun kami (para pelaku pernikahan semarga) berada.¹¹⁴

Sampai sekarang kami (pelaku pernikahan semarga) tidak dibenarkan pulang kampung ke Desa Setia, walaupun kami sangat merindukan keluarga kami yang berada di kampung. Kami dapat berjumpa pada keluarga, hanya pada waktu keluarga yang menjumpai kami (pelaku) di luar daerah Batak Toba. Kami boleh dijumpai oleh pihak keluarga di suatu daerah yang daerah tersebut tidak mengetahui status pernikahan kami. Sungguh sangat menyakitkan hati bagi kami dan bagi keluarga, namun apa boleh buat, kita tidak mungkin berpisah (suami-istri semarga).

Sampai sekarang, kami (pelaku pernikahan semarga) tidak dibenarkan mengikuti acara adat istiadat Batak Toba. Sekalipun acara adat istiadat Batak Toba itu diadakan oleh suku Batak Toba yang tinggal di kota. Kapanpun dan di manapun ada acara adat Istiadat Batak Toba diadakan, kami (pelaku larangan

dari Ibu D. Buru Gultom dan suaminya Marusuf Gultom alias Usuf Gultom, sekarang ada yang berdomisili di daerah Jalan Rakyat dekat Gang Sado, Medan).

¹¹⁴Wawancara tanggal 23 Maret 2014 bersama bapak Marusuf Gultom Dan ibu D. Boru Gultom. Menurut penuturan ibu D. Boru Gultom dan Suaminya Marusuf Gultom, pada mulanya pihak keluarga melarang kami untuk menikah dan membenci hubungan pernikahan kami, namun yang namanya keluarga, tidak mungkin meniadakan kami dari garis keluarga. Sebenci apapun keluarga, namun akan tetap ada kebaikan hatinya.

pernikahan adat) dilarang untuk mengikutinya. Bahkan yang paling menyedihkan, apabila ada anggota keluarga kami (pernikahan semarga) yang meninggal di kampung (Desa Setia), kami dilarang untuk melayatnya. Karena kami telah terlarang masuk ke daerah desa yang melarang kami untuk tinggal. Sungguh sangat sedih bagi kami pelaku larangan pernikahan adat. Dan sampai sekarang, kami tidak dibenarkan pulang ke kampung halaman (Desa Setia).

2. Dampak pada anak dari segi sosial adat Batak Toba

Marusuf Gultom dengan Istrinya D. Boru Gultom Gultom:¹¹⁵

Anak yang terlahir dari kami pelaku pernikahan semarga di kemudian hari akan dikucilkan oleh kelompok adat Batak Toba. Dan anak kami tersebut dianggap sebagai anak yang terlahir sebagai anak haram. Dan anak tersebut tidak dibenarkan dipestakan secara adat Batak Toba, baik dipestakan waktu baru lahir menerima selendang (*manjalo parompa*),¹¹⁶ maupun pesta pernikahannya nanti di kemudian hari.

Seperti anak kami, dulu waktu baru lahir, dia tidak dibenarkan dipestakan secara adat Batak Toba. Kami membuat pestanya memakai adat Batak Mandailing yang kebanyakan sudah beragama Islam dan tidak begitu kental lagi dengan aturan hukum adat.

3. Dampak pada kesehatan anak

Dampak dari perkawinan hubungan *Inces* adalah kemungkinan besar akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozygot*.¹¹⁷ Beberapa penyakit yang diturunkan melalui *gen homozygot resesif* yang dapat

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Dalam tradisi adat Batak Toba, anak yang baru lahir biasanya dipestakan. Dengan memberi selendang kepada si anak yang baru lahir.

¹¹⁷ <http://sijaribu.wordpress.com/2014/03/08/perkawinan-sedarah>. jam 13.00.

menyebabkan kematian pada bayi, fatal *anemia*, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, *albino*, *polydactyl* dan sebagainya.¹¹⁸

Pada perkawinan berhubungan darah yang dekat yang mengandung *gen albino* maka kemungkinan keturunan *albino* lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dari riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Selain itu banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus *Inces* seperti kelainan genetik yang menyebabkan gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*), keterlambatan mental (*idiot*) dan perkembangan otak yang lemah.¹¹⁹

4. Dampak pada ibu dan anak dari segi psikologis

Akibat dari tindakan incest pada wanita, mereka akan mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan. Khususnya *inces* karena tindakan paksaan. Dan dampaknya pada anak yang lahir, juga akan mengalami gangguan kejiwaan.¹²⁰

5. Dampak dari segi kemanusiaan

Secara umum tindakan yang salah, dapat dipastikan akan bertentangan menurut hati nurani setiap manusia. Tindakan *inces* adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka

¹¹⁸ Alf. Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008), h. 49.

¹¹⁹ *Ibid.*, h.50.

¹²⁰ Alf. Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008), h. 49.

sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *Inses* telah mengorbankan perasaan moral publik.¹²¹

3. *Dua Punggu Sada Ihotan*

Dua Punggu Sada Ihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga B tersebut. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Larangan ini disebabkan adanya larangan saling menyapa yang berlaku dalam hubungan tertentu, misalnya istri adik laki-laki (*anggi boru*) tidak diperkenankan berbicara dengan kakak laki-laki (*haha doli* dan *vice versa*). Tetapi seseorang selalu boleh berbicara dengan saudara perempuan dari istri sendiri (*pariban-nya*). Namun apabila adik dari seorang laki-laki kawin dengan saudara perempuan istrinya, akan terjadi perubahan aturan tutur (aturan tegur sapa) dalam peristilahan hubungan (*imbar ni partuturan*). Hal ini tidak boleh terjadi karena dia telah mengacaukan *partuturan* (hubungan tegur sapa). Adapun sebab larangan bertegur sapa antara seorang laki-laki dengan istri adik laki-laki, karena larangan adab saja. Ini dianggap tidak bagus oleh pandangan masyarakat adat Batak Toba Desa Setia.¹²²

¹²¹ Abdur Rahman, *Islam dan Nilai-Nilai Moral* (Jambi: Amani, 2006), h.97.

¹²² Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, dan ibu Basaur Hutasuhut, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan "*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*" (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 99-109. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986), h. 197-209.

4. *Marboru Namboru*

Marboru Namboru: Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi *boru* (anak perempuan) dari *Namboru kandung*/saudari ayah dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.

Penyebab larangan pernikahan dalam segi ini adalah karena dianggap sebagai *iboto*/ bersaudara. Dianggap sebagai *iboto* karena garis keturunan dari ayah (kita) semuanya adalah saudara /*mariboto*. (Inilah dampak yang muncul dari sifat perkawinan orang Batak Toba yang bersifat eksogami dan patrilineal). Dan pertuturan orang Batak Toba dengan anak perempuan dari saudara ayah bertegur sapa dengan panggilan *iboto* (*Iboto* itu adalah panggilan bagi saudara/i). Seperti dalam penjelasan tentang saudara dalam pembahasan awal, “pernikahan saudara” (tentang pembahasan semarga dan PARNA)” bahwa orang yang dianggap bersaudara dalam pertuturan orang Batak Toba, sangat dilarang untuk menikah.¹²³ Dan sampai sekarang, aturan adat ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Muslim Desa Setia.

5. *Pariban Na So Boi Olion/ Boru Tulang Naso Boi Olion*

Ternyata ada *Pariban* yang tidak bisa saling menikah, siapa dia sebenarnya? Bagi orang Batak aturan/ *ruhut* adat Batak ada dua jenis untuk kategori *Pariban Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *Pariban* kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu *Pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 7 orang perempuan *Pariban* kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak boleh dua orang atau lebih menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah *Pariban*

¹²³ *Ibid.*,

kandung/ atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

1). *Pariban* Kandung hanya boleh menikah dengan satu *pariban* saja, adanya larangan ini karena disamakan dengan larangan pernikahan *dua punggu sada ihotan*. Dan juga akan mengakibatkan larangan bertegur sapa antara istri dari adik laki-laki dengan abang dari suaminya. Padahal secara adat, walaupun mereka tidak menikah, mereka boleh bertegur sapa, karena *boru tulang (pariban)*.¹²⁴

2). *Pariban* kandung/ atau tidak. Seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang wanita yang semarga dengan marga ibu dari ibu kandung kita sendiri. Maksudnya, jika ibu yang melahirkan ibu kita ber marga A, sedangkan si wanita tersebut juga bermarga A, baik keluarga dekat atau jauh, maka kita dilarang menikahi wanita tersebut.

Adanya larangan ini sangat mengganggu dan sangat menyakitkan hati bagi banyak kalangan pemuda. Terutama bagi pemuda/i yang terlanjur menjalin hubungan pacaran dengan *boru tulang naso boi olion*. Ini pernah dialami oleh saudara Mangampu Siregar. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Mangampu Siregar sebagai berikut:¹²⁵

Saya (Mangampu Siregar) harus menelan pahit dari peraturan yang sudah ditentukan oleh panatua kampung kita (Desa Setia Sirihit-rihit). Pernikahan yang

¹²⁴*Ibid.,..*

¹²⁵ Wawancara di rumah/kos saudara Mangampu Siregar di jalan Durung/jalan Makmur di depan SMP Pahlawan Pancing Medan, pada tanggal 11 Oktober 2013. (Mangampu siregar adalah korban peraturan hukum adat “*Boru Tulang Naso Boi Olion* pada bulan Mei 2012 lalu. Saudara Mangampu adalah warga Desa Setia Kecamatan Pahae Jae. Namun karena saudara tersebut bekerja di sekitar Medan, makanya di wawancarai di jalan Durung.

sudah kami rencanakan pada bulan Mei 2012 lalu yang rencana pernikahannya tinggal menunggu hari harus dibatalkan. Dibatalkan Karena belakangan panatua kampung mengetahui status adat kami dengan calon istri adalah *marbaro tulang* yang tak boleh nikah (menurut adat Batak Toba). Walaupun pernikahan kami belum terjadi, namun saya harus menahan sakit hati dengan adanya aturan tersebut. Belum lagi sakit hati karena harus berpisah dengan wanita yang begitu saya cintai. Tapi sekarang saya harus lebih tabah lagi, karena sudah jadi aturan hukum adat kita seperti itu tandasnya.

Selain aturan di atas masih ada aturan yang mengatur tentang perkawinan yang dilarang menurut hukum adat Batak Toba Desa Setia seperti berikut ini:¹²⁶

- 1. *Inang Pangintubu Ni Iba/Ibu Kandung***
- 2. *Inang Panoroni nioli ni Amangniba/Ibu tiri.***
- 3. *Inang ni Amaniba (Ompung boru)/Nenek***
- 4. *Inang panoroni ni Amangniba/Nenek tiri***

Poin 1-4 di atas menurut adat Batak Toba, dilarang dinikahi karena masih tergolong ibu atau nenek kita sendiri. Hubungan keluarga jauh, atau bahkan tidak ada hubungan apa-apa kecuali hanya semarga, sangat dilarang kita nikahi, apalagi wanita yang melahirkan kita, atau wanita yang melahirkan ayah kita, demikian juga dengan ibu tiri dan nenek tiri, tentu sangat dilarang untuk dinikahi. yang semarga dari keluarga jauh aja dilarang dinikahi apalagi 4 orang tersebut di atas.

¹²⁶ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, dan ibu Basaur Hutasuhut. Dan sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan "*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*" (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 206-209. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197-209.

5. *Boru ni Amaniba (ibotoniba sandiri)/Saudara Kandung.*

Menikahi saudara semarga saja sudah sangat dilarang dalam adat Batak Toba. Dan tindakan ini sudah tergolong sebagai pernikahan *inces*, tentu lebih dilarang lagi menikahi saudara kandung sendiri karena wanita tersebut sedarah dengan kita.

6. *Iboto ni Amaniba (Namboruniba)/Saudara Perempuan Ayah.*

Dilarang menikah dengan saudara perempuan ayah, karena saudara perempuan ayah masih tergolong sebagai orang tua bagi kita.

7. *Boru ni Ibotoniba(bere)/Putri dari saudara perempuan kita.*

Dilarang menikah dengan putri saudara, karena kita sudah tergolong sebagai orang tua bagi si wanita tersebut. Dalam tradisi Batak Toba, antara anak dan orang tua sangat dilarang untuk menikah.

8. *Parumaenniba na nioli ni Anakniba/Menantu.*

Sama halnya dengan menantu, seorang laki-laki dilarang menikah dengan menantunya karena menantu tersebut sudah tergolong anak bagi kita. Karena menantu tersebut adalah istri dari anak kita, siapa saja yang setara dengan anak kita adalah tergolong anak bagi kita.

9. *Boru ni Amangtua manang Amanguda niba/Putri dari saudara laki-laki ayah kandung.*

Wanita ini dilarang dinikahi menurut adat Batak Toba, karena:

1. wanita ini masih termasuk anak perempuan dari ayah kita sendiri, walaupun memang bukan anak kandung dari ayah kita. Karena ayah kita setara dan bersaudara dengan ayah si wanita ini, maka dia juga putri dari

ayah kita. Ayah kita dengan ayah si wanita masih sedarah, maka wanita ini masih bagian dari darah daging ayah kita sendiri. Bagian dari darah daging ayah kita sendiri sangat dilarang untuk dinikahi, karena tergolong pernikahan *inces*. Dan ini termasuk implikasi/dampak baik dari sifat pernikahan Batak Toba yang bersifat eksogami dan patrilineal.

2. Wanita ini masih semarga dengan kita. Wanita yang semarga dengan kita adalah termasuk saudara kita juga. orang yang bersaudara/I sangat dilarang untuk menikah.

10. *Nioli ni Tungganeniba naung mabalu (Inangbaoniba)* Istri dari lae yang sudah janda.

Wanita ini dilarang untuk dinikahi karena larangan bertegur sapa/ larangan berbicara tanpa kehadiran pihak ketiga, dan larangan berduaan/ berdekatan tanpa kehadiran pihak ketiga. Walaupun si wanita sudah berstatus janda, aturan larangan bertegur sapa dan aturan lainnya masih tetap diberlakukan kepada dua orang ini.

11. *Boru ni Namboruniba*/Putri dari Saudara Perempuan Ayah

Lihat pembahasan sebelumnya tentang *Nioli anak Namboru*.

12. *Nantulang manang Nantulang panoroni*/Istri Tulang.

Tulang adalah saudara bagi ibu kandung atau ibu tiri kita. Dan posisi tulang dengan ibu kita adalah setara. Tulang termasuk bagian dari orang tua kita. Dan istri tulang juga termasuk bagian dari orang tua kita. Karena istri tulang setara dengan tulang dan tulang setara dengan ibu kita. Dan kita sangat dilarang menikah dengan orang yang setara dengan orang tua kita.

13. *Boru ni dongan samarga dohot iba/ Anak perempuan dari teman semarga (satu marga).*

Disamping kita setara dengan orang tua si wanita. Kita juga satu marga dengan dengan si wanita tersebut. Dalam tradisi Batak Toba, orang yang semarga sangat dilarang untuk dinikahi. (lihat pembahasan sebelumnya tentang semarga).

14. *Boru naniain (adopsi)/Saudara hasil adopsi orang tua*

Menurut adat Batak Toba, walaupun saudara adalah hasil adopsi orang tua, itu termasuk juga saudara bagi kita. Dan yang bersaudara, sangat dilarang untuk menikah.

15. *Napareakkon Boru-boru namabalu anggo so salpu dope tingki haroanna atik naung marisi bortianna. /Menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan).*

Untuk mengantisipasi percampuran benih dari laki-laki sebelumnya (mantan suami yang sudah meninggal dunia). Maka dilarang untuk menikahi wanita ini.

16. *Boru-Boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)/Istri Teman).*

Di samping kita menjaga perasaan orang lain (suami si wanita), kita dilarang menikahi wanita ini karena masih berstatus istri bagi orang lain.

17. *Boru-boru namandiori parlindungan ala marbadai dohot sinondukna./ Perempuan yang mencari perlindungan karena cecok dengan suaminya.*

Di samping kita dilarang menikahi wanita ini karena masih berstatus istri bagi orang lain, kita juga disuruh untuk menjaga perasaan orang lain (suami si wanita). Walaupun lagi ada konflik dalam rumah tangga si wanita tersebut, kita sangat dilarang menikah dengan wanita seperti ini, karena akan menambah rumit rumah tangga wanita tersebut. Seharusnya perlindungan yang harus kita berikan pada si wanita, bukan menikahnya.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia.

Adapun uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan dalam adat Batak Toba adalah sebagai berikut:

1. *Namarpandan*

Namarpandan/ padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang *padan* marga.¹²⁷

Tinjauan hukum Islam:

Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun / Perundang-undangan, maka larangan hukum adat dalam hal "*Namarpandan*" dan semua kategorinya adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam (lihat kelompok *namarpadan* dalam pembahasan sebelumnya). Namun apabila kita melihat / meninjau dari tujuan hukum Islam,

¹²⁷ Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutasuhut, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan "*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*" (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 99-109. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197-209.

termasuk tujuan hukum Islam itu adalah untuk menciptakan kebaikan hidup individu / masyarakat, ketentraman individu / masyarakat dan kesejahteraan individu / masyarakat, maka orang atau kelompok orang yang terlibat dalam hal “*Namarpadan*” yang merasa baik, tentram dan sejahtera dengan aturan hukum adat itu, justru mereka itu telah mengembangkan dan mempeluas hukum Islam dalam merealisasikan aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Tapi dengan adanya sanksi hukum adat yang menyalahi hukum Islam, yang diberikan kepada orang yang melanggar perjanjian/*Namarpadan*, maka aturan hukum adat batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

2. *Namarito*

Namarito (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Dan kumpulan PARNA juga sangat dilarang untuk saling menikah:¹²⁸

Tinjauan hukum Islam:

“*Namarito*” (*ito*), atau bersaudara laki-laki dan perempuan (kandung yang tergolong mahram menurut hukum Islam)”, larangan pernikahan ini sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan ini dapat kita terima menurut hukum Islam. Namun dalam masalah “marga yang dinyatakan sama”, menurut aturan hukum Islam ini bisa jadi dapat diterima oleh hukum Islam dan bisa juga tidak dapat diterima oleh hukum Islam. 1). Dapat diterima oleh hukum Islam ketika marga yang dinyatakan sama, misalnya menikah antara seorang laki-laki bermarga Gultom dengan saudara perempuan ayah/bibinya yang bermarga Gultom. 2). Tidak dapat diterima/bertentangan dengan hukum Islam, karena wanita yang

¹²⁸ *Ibid.*,

sudah diluar jalur mahram menurut hukum Islam boleh dinikahi oleh seorang laki-laki.

Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan, maka larangan hukum adat "*Namar ito*" (yang diluar mahram hukum Islam) dalam semua kategorinya adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam (lihat kelompok "*namar ito*" dalam pembahasan sebelumnya). Namun apabila kita melihat / meninjau dari tujuan hukum Islam yaitu termasuk untuk menciptakan kebaikan hidup individu / masyarakat, ketentraman individu / masyarakat, dan kesejahteraan individu / masyarakat, maka kelompok orang-orang yang terlibat dalam "*Namar ito*" yang merasa baik, tentram dan sejahtera dengan aturan hukum adat itu, justru mereka itu telah mengembangkan dan mempeluas hukum Islam dalam merealisasikan aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Tapi dengan adanya sanksi hukum adat yang menyalahi hukum Islam, diberikan kepada yang melanggar aturan pernikahan dalam hal *Namar Ito*, maka aturan hukum adat batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

3. *Dua Punggu Sada Ihotan*

Dua Punggu Sada Ihotan artinya adalah kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

Tinjauan hukum Islam:

Aturan ini bertentangan dengan hukum Islam karena dalam aturan hukum Islam membolehkan kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik. Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum

syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan, maka larangan hukum adat *Dua Punggu Sada Ihotan* adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam. Namun apabila kita melihat / meninjau dari tujuan hukum Islam yaitu termasuk untuk menciptakan kebaikan hidup individu / masyarakat, ketentraman individu / masyarakat, dan kesejahteraan individu / masyarakat, maka kelompok orang-orang yang terlibat dalam hal "*Dua Punggu Sada Ihotan*" yang merasa baik, tentram dan sejahtera dengan aturan hukum adat itu, justru mereka itu telah mengembangkan dan mempeluas hukum Islam dalam merealisasikan aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Tapi dengan adanya sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan "*Dua Punggu Sada Ihotan*" maka aturan hukum adat batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

4. *Marboru Namboru / Nioli Anak Ni Tulang*

Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang: Larangan berikutnya adalah seorang laki-laki dilarang menikahi *boru* (anak perempuan) dari *Namboru*/saudara perempuan ayah (kandung).¹²⁹

Tinjauan hukum Islam:

Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan, maka larangan hukum adat "*Marboru Namboru*" adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam. Namun apabila kita melihat / meninjau dari tujuan hukum Islam yaitu termasuk untuk menciptakan kebaikan hidup individu / masyarakat, ketentraman individu / masyarakat, dan kesejahteraan individu / masyarakat, maka kelompok orang-orang yang terlibat dalam hal "*Marboru Namboru*" yang merasa baik,

¹²⁹ Namboru kandung adalah saudara perempuan ayah.

tentram dan sejahtera dengan aturan hukum adat itu, justru mereka itu telah mengembangkan dan memperluas hukum Islam dalam merealisasikan aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Tapi dengan adanya sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan “*Marboru Namboru*” maka aturan hukum adat batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

5. *Pariban Na So Boi Olion / Boru Tulang Naso Boi Olion*

Ada dua jenis kategori *Boru Tulang Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *Boru Tulang* kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu *Pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan *Pariban/Boru Tulang* kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah *Pariban* atau *Boru Tulang* kandung/ atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau jauh, maka tidak diperbolehkan saling menikah.

Tinjauan hukum Islam:

Kategori pertama yaitu *Pariban* kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu *Pariban* saja. Ini bertentangan dengan aturan hukum Islam, karena aturan hukum Islam membolehkan menikah antara dua orang laki-laki yang bersaudara dengan perempuan yang bersaudara. Masalah ini hampir sama dengan masalah “*Dua Punggu Sada Ihotan*” artinya adalah kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Aturan ini tidak dapat diterima oleh hukum

Islam karena dalam aturan hukum Islam membolehkan kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik.

Kategori kedua adalah *Pariban* kandung/ atau tidak, yang berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung kita sendiri. Dalam aturan hukum adat Batak Toba menganggap bahwa aturan ini hampir sama dengan pernikahan “*namarito (ito)*”, atau bersaudara laki-laki dan perempuan. Larangan pernikahan ini tidak sesuai menurut aturan hukum Islam dan aturan ini tidak dapat kita terima menurut hukum Islam.

6. *Inang pangintubu ni iba / Ibu Kandung*

Tinjauan hukum Islam:

Larangan hukum adat Batak Toba ini dapat diterima oleh hukum Islam karena sesuai dengan aturan hukum Islam baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan,. (Lihat mahram menurut hukum Islam). Dan hukum adat Batak Toba ini telah melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

7. *Inang Panoroni Nioli Ni Amangniba / Ibu tiri*¹³⁰

Tinjauan hukum Islam:

Apabila ibu tiri tersebut sudah pernah akad nikah dengan ayah kita, baik sudah dicampuri atau belum, maka wanita tersebut tidak boleh kita nikahi (menurut jumhur ulama). Maka larangan hukum adat Batak Toba ini dapat diterima oleh hukum Islam. Dan hukum adat Batak Toba ini telah melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

¹³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.327.

8. *Parumaen niba nioli ni Anak niba / Menantu.*

Tinjauan hukum Islam:

Aturan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam. Dan hukum adat Batak Toba ini telah melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

9. *Inang Ni Amaniba (Ompung boru) / Nenek.*

Tinjauan hukum Islam:

Larangan pernikahan adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam. Ini dapat diterima oleh hukum Islam karena sesuai dengan aturan hukum Islam baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan,. (Lihat mahram menurut hukum Islam). Dan hukum adat Batak Toba ini telah melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

10. *Inang Panoroni ni Amangniba / Nenek tiri.*

Tinjauan hukum Islam:

Apabila nenek tiri tersebut sudah pernah akad nikah dengan kakek kita, baik sudah dicampuri atau belum, maka wanita tersebut tidak boleh kita nikahi (Nenek tiri sama dengan ibu tiri). Aturan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam.

11. *Nioli ni Tungganeniba naung Mabalul (Inangbaoniba)/Istri dari lae/*

Ipar yang sudah janda

Tinjauan hukum Islam:

Apabila wanita ini sudah berstatus janda dan telah selesai masa Iddahnya, maka hukum Islam membolehkan menikahi wanita ini.

12. *Nantulang manang Nantulang Panoroni / Istri Tulang*

Tinjauan hukum Islam:

Apabila wanita masih berstatus istri maka haram untuk dinikahi, tapi apabila sudah cerai dari suaminya maka boleh dinikahi menurut hukum Islam. Namun lain halnya apabila *Nantulang* tersebut telah di ceraikan oleh *Tulang*, dan telah selesaaai masa *Iddahnya*, maka hukum Islam membolehkan menikahi *Nantulang* tersebut.

13. *Boru ni Amaniba (ibotoniba sandiri)/Saudara/i Kandung*

Tinjauan hukum Islam:

Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan, maka larangan pernikahan hukum adat ini dalam kategori "Saudara/i Kandung" sangat sesuai dengan aturan hukum Islam.

14. *Boru ni Amangtua manang Amanguda niba/Putri dari saudara laki-laki ayah*

Tinjauan hukum Islam:

Larangan pernikahan adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena seharusnya kebalikan dari *boru tulang* tetap boleh untuk dinikahi. Hukum Islam membolehkan menikahi wanita dalam kategori ini.

15. *Iboto ni Amaniba (Namboruniba)/Saudara Perempuan Ayah / Bibi*

Tinjauan hukum Islam:

Larangan pernikahan adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam. Ini dapat diterima oleh hukum Islam karena sesuai dengan aturan hukum Islam baik

dalam kategori hukum syara', fiqh dan qanun /perundang-undangan,. (Lihat mahram menurut hukum Islam). Dan hukum adat Batak Toba ini telah memperkuat teori hukum Islam.

16. *Boru ni Namboruniba* / Putri dari Saudara Perempuan Ayah

Tinjauan hukum Islam:

Larangan hukum adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam arti, aturan ini bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dalam kategori hukum syara', fiqh dan qanun/ perundang-undangan. (Lihat mahram menurut hukum Islam).

17. *Boru ni Ibotoniba(bere)* / Putri dari saudara perempuan

Tinjauan hukum Islam:

Larangan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan aturan hukum Islam.

18. *Boru Ni Dongan Samarga dohot Iba*/ Anak perempuan dari teman satu marga

Tinjauan hukum Islam:

Larangan hukum adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dapat dipastikan, bahwa “anak perempuan dari teman satu marga” ini bukan mahram lagi menurut ketentuan aturan hukum Islam. Kecuali teman semarga itu adalah saudara kandung atau kelompok “*mahram*” menurut hukum Islam.

19. *Boru naniain* (adopsi)/Saudara hasil Adopsi orang tua

Tinjauan hukum Islam:

Larangan hukum adat ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

20. *Napareakkon Boru-boru namabalu anggo sosalpu dope tingki haroanna atik naung marisi bortianna*/Menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (atau masa iddah 9 bulan)

Tinjauan hukum Islam:

(1). Ini dapat sesuai dengan aturan hukum Islam: Apabila perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddah (masa menunggu bagi seorang wanita yang cerai, baik karena cerai hidup atau cerai mati dengan suaminya) bagi janda tersebut hanya sampai melahirkan anak yang ada dalam rahimnya. Dan perempuan janda tersebut tidak wajib menunggu sampai 9 bulan setelah melahirkan. Namun apabila wajib menunggu sampai 9 bulan, maka aturan hukum adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan hukum Islam).

(2). Ini dapat sesuai dengan aturan hukum Islam: Dengan catatan bahwa janda yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah wanita janda tersebut hanya selama 130 hari menurut *Kompilasi Hukum Islam*.¹³¹ Namun apabila masa iddah perempuan janda tersebut harus menunggu sampai 9 bulan, ini tidak sesuai lagi dengan aturan hukum Islam).

¹³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) poin a.

21. *Boru-Boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)/Istri Teman*

Tinjauan hukum Islam:

Apabila status seorang wanita tersebut sebagai istri walaupun istri teman, maka hukum Islam melarangnya untuk dinikahi. Dan aturan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam. Namun apabila status istri teman (tadi) sudah sebagai mantan istri yang sudah selesai masa iddahnya, maka menurut aturan hukum Islam, wanita tersebut boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Dan apabila status wanita tersebut sebagai istri dalam masa Iddah menurut hukum adat Batak Toba 9 bulan, maka terhitung setelah waktu yang ditentukan oleh hukum Islam yaitu setelah melalui masa iddah 130 hari,¹³² maka wanita tersebut boleh dinikahi.

22. *Boru-boru Namandiori Parlindungan Ala marbadai Dohot Sinondukna/*

Wanita yang mencari perlindungan, karena cecok dengan suaminya.

Tinjauan hukum Islam:

Apabila status seorang wanita tersebut sebagai istri walaupun istri tersebut yang lagi cecok dengan suaminya, maka hukum Islam melarangnya untuk dinikahi. Larangan hukum adat Batak Toba ini sangat sesuai dengan aturan hukum Islam.

Selain dari aturan hukum yang sudah ditentukan oleh hukum Islam di atas, maka hukum Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita.

¹³² *Ibid.*

D. Analisis Penulis

Kalau kita tinjau dari aturan hukum Islam, hukum Islam membolehkan menikahi wanita di luar dari ketentuan *Mahram* yang sudah digariskan oleh hukum Islam. Dan selayaknya orang Islam itu hanya diatur oleh aturan hukum Islam saja dan sanksi hukumnya juga hanya boleh dikenakan sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena aturan yang dibuat oleh hukum Islam di atas bersumber dari kitab suci Alquran (hukum syara'), dan Alquran tersebut bersumber dari wahyu Allah melalui seorang Nabi (Muhammad SAW). Sumber tersebut di perkuat dan ditetapkan oleh ulama fiqh sehingga tertuang dalam kitab-kitab fiqh dan juga Perundang-undangan di Indonesia yaitu */Kompilasi Hukum Islam* ("Pasal 4, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam", dalam hukum agama Islam sebagai syarat akan dilangsungkannya suatu pernikahan, termasuk harus telah terpenuhi syarat nikah tentang "*al-muharramat*". Apabila syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, termasuk syarat *al-muharramat*, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah) dan juga bersumber dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah Undang-undang pernikahan tersebut di atas diberlakukan, dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. (Bagi yang beragama Islam hukum pernikahan yang berlaku adalah Hukum Islam). Dan keabsahan hukum yang ditetapkan dalam aturan hukum di atas, sangat diperhitungkan dalam negara kita. Sedangkan aturan hukum adat Batak Toba tersebut bersumber dari manusia, manusia itu ada sifat lupa, khilaf dan tidak sanggup menjangkau apa hakekat dari aturan yang dibuat

oleh orang-orang dahulu (yang pertama kali menerapkan aturan hukum adat Batak Toba) terhadap larangan pernikahan adat. Dan juga keabsahan hukum yang ditetapkan dalam hukum adat Batak Toba, kurang diperhitungkan dalam negara kita. Kekuatan hukum adat sangat lemah apabila dibandingkan dengan hukum yang bersumber dari Tuhan dan juga diperkuat oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu *Kompilasi Hukum Islam*.

Kalau kita hubungkan antara larangan pernikahan adat Batak Toba dengan larangan pernikahan menurut hukum Islam, dapat kita pahami bahwa, apa yang dilarang oleh hukum adat Batak Toba, secara teks sebagian sesuai dengan apa yang dilarang oleh hukum agama Islam. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh hukum Islam, larangan tersebut sebagian juga sesuai dengan larangan hukum adat (Batak Toba Desa Setia). Dan kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, bahwa semua kategori larangan pernikahan dalam adat Batak Toba ini sangat sesuai dengan aturan hukum Islam. Justru aturan hukum adat Batak Toba telah mengembangkan dan memperluas aturan hukum Islam tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Hukum adat Batak Toba memandang lebih luas dari patokan standar minimal yang ada dalam teks aturan hukum Islam, baik aturan hukum Islam dalam kategori hukum syara', fiqh maupun Qanun / Perundang-undangan. Tapi yang menjadi masalah adalah karena adanya sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar larangan hukum adat. Dan inilah jugalah yang membedakan dan justru membuat aturan hukum adat Batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

(Yang menjadi masalah bagi penulis, hampir semua tokoh adat di Desa Setia ini beragama Islam. Namun kenapa mereka harus tetap mempercayai hal

(mitos) tersebut? (kecuali larangan menikah dengan wanita yang tergolong mahram dalam hukum Islam). Bukankah agama Islam tidak melarang menikahi sebahagian orang (wanita) yang sudah ditentukan oleh hukum adat Batak Toba, khususnya yang semarga?. Manakah yang kita dahulukan antara urusan agama (Islam) dengan urusan adat Batak Toba? Dan kenapa kita tidak mencoba menerobos larangan tersebut? Dan sampai kapankah kita harus percaya dengan larangan tersebut?).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan pernikahan Adat Batak Toba Desa Setia

Dalam aturan perkawinan adat bagi masyarakat Mulim Batak Toba Desa Setia, ada “larangan pernikahan adat”. Bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan, lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan yang telah dianggap memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

2. Faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan pernikahan adat bagi masyarakat muslim Batak Toba Desa Setia

Adapun faktor-faktor larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba adalah karena ikrar janji, bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama, dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama, seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari bibinya atau sebaliknya, *pariban* yang tidak boleh dinikahi, (semua mahram sebab nasab menurut hukum Islam), istri dari *lae* / ipar yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, istri paman, putri dari teman semarga, saudara hasil

adopsi orang tua, menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan), istri teman, perempuan yang mencari perlindungan karena cekcok dengan suaminya. Dan latar belakang sosiologisnya, karena masyarakat Desa Setia masih tetap mempercayai dan mentaati dengan setia aturan hukum adat Batak Toba yang sudah berjalan turun temurun dari orang-orang terdahulunya. Aturan hukum adat Batak Toba ini telah terpatri atau tertanam kuat dalam setiap benak masing-masing warga, sehingga sangat sulit untuk meninggalkannya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia:

Larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, secara teks hukum Islam, banyak yang sesuai dengan aturan hukum Islam, tetapi ada beberapa hal yang bertentangan yaitu larangan menikah dengan; *Iboto* atau saudara dalam kategori semarga (di luar mahram nikah menurut hukum Islam), putri dari saudara laki-laki ayah (kandung), (mantan) istri dari *lae/par* yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari teman semarga, saudara perempuan dari hasil adopsi orang tua, menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan), dan istri teman.

Namun kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, bahwa semua kategori larangan pernikahan dalam adat Batak Toba ini, tidak satupun yang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Justru aturan hukum adat Batak Toba ini telah mengembangkan dan memperluas aturan hukum Islam tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Hukum adat Batak Toba memandang lebih luas dari patokan standar minimal yang ada dalam teks aturan hukum Islam, baik aturan hukum

Islam dalam kategori hukum syara', fiqh maupun Qanun / Perundang-undangan. Tapi yang menjadi masalah dengan aturan hukum adat Batak Toba ini adalah karena adanya sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar larangan hukum adat. Sanksi ini yang membedakan dan justru membuat aturan hukum adat Batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

Seharusnya masyarakat Desa Setia yang beragama Islam yang telah melaksanakan aturan hukum pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam dan juga sesuai dengan aturan hukum Negara Indonesia, maka hal itu seharusnya sudah cukup sah menurut hukum Islam dan juga sah menurut hukum Negara Indonesia. Dan tidak boleh lagi ada campur tangan hukum adat untuk melarang pernikahan tersebut untuk dilangsungkan. Karena telah sesuai dengan isi *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I (Hukum Perkawinan) Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Landasan hukum ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I (Dasar Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Muslim dan tokoh adat Batak Toba Desa Setia, sebenarnya larangan pernikahan adat tersebut sangat sesuai dengan prinsip pengembangan hukum Islam. Namun karena ada sanksi hukum adat bagi pelanggar larangan pernikahan adat ini, maka hendaklah larangan pernikahan adat ini diamandemen/ direvisi kembali dan disesuaikan ke dalam aturan hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Sehingga tidak

mencederai hati orang yang ingin menikah dengan larangan hukum adat tersebut. Di samping itu hendaklah para tokoh agama Islam, membantu memberikan pengajaran hukum-hukum Islam tentang larangan pernikahan menurut hukum Islam. Mengingat tokoh agama (Islam) mempunyai peranan penting dalam membentuk keyakinan masyarakat. Sebab tokoh agama adalah panutan masyarakat, terlebih lagi jadi panutan masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia yang sangat panatik dengan aturan hukum adat.

2. Hendaklah umat Islam Batak Toba Desa Setia lebih mengutamakan ajaran hukum Islam dari pada aturan hukum adat. Walaupun kita pandang lebih seksama bahwa hukum adat Batak Toba ini termasuk bagian dari pengembangan hukum Islam yang ada. Tapi karena adanya sanksi bagi pelanggar larangan hukum adat batak Toba ini, maka sebaiknya masyarakat Batak Toba lebih mengutamakan aturan hukum Islam dan aturan hukum Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Peritis, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

As Qallany, Muhammad bin Hajr Al-Kannany. *Sublussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III. Bandung: Dahlan, 1926.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Dalam Angka 2014.

Bahûtî, Mansûr bin Yunus. *Kasyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t..

Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Beik, Syaikh Muhammad Al-Khudri. *Ushul fiqh, Edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Bertrad, Alvin L. *Sosiologi*. Terj. S.S. Faisal . Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV. Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, t.th.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran, 1971.

Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4*. Jakarta, Depag, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dedi, Junaedi. *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2000.

Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Dimyathy, Muhammad Syatha. *I' anatutholibin*. Juz III. Semarang: Karya Thoha Putra, tt.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009. cet. Ke-3.

Ensiklopedi Praktis: *Kerukunan Umat Beragama*. Medan: Perdana Publishing, 2012.

Falah, Ponpes. *Fiqh Lintas Mazhab*. Kediri: Pustaka Agung, 2010.

Ghamarawi, Muhammad al-Zuhri *Al-Sirraj al-Wahhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Gultom, Duma Boru Gultom dan suaminya Dorlan. Wawancara bersama pelaku pernikahan semarga, pada tanggal 23 Maret 2014 bersama Ibu Duma Boru Gultom bersama suaminya Dorlan Gultom. Mereka adalah korban pengusiran pada tahun 1962 dari Desa Setia. Mereka sekarang berdomisili di daerah kota medan dan sekitarnya (Korban tersebut meminta alamatnya dirahasiakan, karena pada dasarnya peneliti juga dilarang untuk berbicara pada pelaku).

Gultom, Marsakkap. Saut Pakpahan, Badu Siregar, Muslim Batu Bara, Taat Ritonga, Wawancara pada tanggal 16- 21 Agustus 2013.

Hadary, Hawaw Mimi Hartini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta, 2003.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadiul al- Awaliyah Fi- Ushulu al-Fiqh Wa Qawai'dul al- Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

<http://borsak.wordpress.com/2014/03/08/pesta-adat-batak-toba>. jam 14.00.

<http://sijaribu.wordpress.com/2014/03/08/perkawinan-sedarah>. jam 13.00.

Husaini, Taqy al-Din Abi Bakar. *Kifayah al-Akhyar*. Juz II. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005.

Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Jaziri, Abdur-Rahman. *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.

- Kâsânî, Mas'ûd bin Ahmad. *Badâ'î' al-Shanâ'î fî Tartîb al-Syarâ'î'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Al-Fiqh*. Jeddah: Al-Harmain, 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2009.
- M.A. Al-Hanafy. *Jangan Takut Menikah*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Terj. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesi*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1997.
- Nasrun, Harun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution, Yasir. "Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. III,
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia:Kompilsi Hukum Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Podgorezki, Adam. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- PPs IAIN SU. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Medan: PPS IAIN SU, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Raharso, Alf. Catur. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma, 2008.
- Rahman, Abdur. *Islam dan Nilai-Nilai Moral*. Jambi: Amani, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar baru, 1993. cet.ke-22.
- S. Widiastuty. *Garand Kamus*. Surabaya: Apollo, tt.

- Sahrani, H.M.A Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat (kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. cet. ke-2.
- Siahaan, Bisuk. Batak Toba: *Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation, 2005.
- Sidin, H.M. *Asal Usul Adat Resam Melayu*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964.
- Siregar, Ramlan. Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2013 bersama bapak Ramlan Siregar selaku bapak Kepala Desa Setia.
- Siregar, Mangampu. Wawancara tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 16 Maret 2014. (Mangampu siregar adalah korban peraturan hukum adat “Boru Tulang Naso Boi Olion pada bulan Mei 2012 lalu.
- Soepomo. *Hukum Adat di Indonesia* . Jakarta, Pradnya Paramita 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sungguno, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: University Perss, 1995.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Nanggro Aceh Darussalam: Nadiya Foondation, 2004.
- Syafi’i, Ahmad. *Kamus Arab Annur*. Surabaya: Halim Jaya Surabaya, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syâthirî, Muhammad bin `Ahmad bin `Umar. *Syarh al-Yâqûl al-Nafîs*. Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007.
- Syukur, Sarmin. *Sumber sumber Hukum Islam*. cet. I. Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cita Media Pres, t.t.
- Thalib, Sayuti. *Lima Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI, Pasal 1. Jakarta: Alda, t.th.
- Usman, Muchlis. *Kaidah kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002. cet. Ke-4.
- 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih *Syarh Manzhûmah: Ushulil Fiqh wa Qawa'idhi*. Beirut: Dar Ibnul Jauzi, tt.
- Verouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yayasan Adikarya Ikapi-The ford Foundation 1986), h.209-275.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Zahrah, Imam Muhammad Abu. *Ushuulul al- Fiqh*. Beirut; Dar al-Fikri, t.t.
- Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004. Vol.9
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekt Islam*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1997.

Yang bertindak sebagai eksekutor hukum adat Batak Toba pada kasus pernikahan semarga antara Marusuf Gultom dengan D. br. Gultom yang terjadi di Desa Setia adalah:

1. Dayat Gultom : Sebagai Kepala Negeri yang bertindak sebagai ketua (ketua tokoh adat)
2. Untung Gultom : Anggota I (tokoh adat)
3. Maknusin Gultom : Anggota II (tokoh adat)

Menyidangkan perkara hukum adat Batak Toba Desa Setia, dalam kasus pernikahan semarga antara Marusuf Gultom alias Usuf Gultom sebagai pihak laki-laki dengan Duma Boru Gultom sebagai pihak perempuan.

Tokoh adat memberi sanksi atas pelanggaran hukum adat Batak Toba kepada kedua belah pihak dengan sanksi sebagai berikut:

1. Apabila Marusuf Gultom alias Usuf Gultom sebagai pihak laki-laki dengan D. Boru Gultom sebagai pihak perempuan, masih ingin tetap tinggal di Desa Setia, maka keduanya harus memotong kerbau secara hukum adat (Batak Toba), sebagai sanksi atas pelanggaran hukum adat “pernikahan semarga”.
2. Apabila Marusuf Gultom alias Usuf Gultom sebagai pihak laki-laki dengan D. Boru Gultom sebagai pihak perempuan tidak bersedia menerima sanksi tersebut di atas, maka tidak selayaknya berdiam diri untuk tetap tinggal di daerah hukum Batak Toba, Khususnya di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Penjelasan tentang tokoh di atas:

1. Dayat Gultom adalah seorang Kepala negeri, yang biasa disebut dengan sebutan "*Raja i*".
2. Untung Gultom adalah seorang tokoh adat sebagai anggota I. Bapak Untung Gultom ini adalah ayah dari saudara/i (Miduk Gultom atau Purnama Br.Gultom).
3. Maknusin Gultom adalah seorang tokoh adat yang bertindak sebagai Anggota II. Bapak Maknusin Gultom adalah ayah dari Saudara Parlin Gultom atau Sintong Gultom.



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan bapak Kepala Desa Setia Ramlan Siregar=



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan Tokoh Adat Desa Setia Bapak Syamsuddin
Pasaribu=



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan Tokoh Adat Desa Setia Bapak Saut Pakpahan=



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan Tokoh Adat Desa Setia Bapak Untung Gultom. Bapak Untung Gultom ini termasuk orang yang menyidangkan perkara pernikahan semarga Marusuf Gultom alias Usuf Gultom dengan istrinya=



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan Tokoh Adat Desa Setia Bapak Derman Gultom=



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan Tokoh Adat Desa Setia Bapak Tangoar Panggabea=



=Peneliti sedang wawancara bersama dengan Tokoh Adat Desa Setia Bapak Hasaruddin Batubara=